



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM REGIONAL, INVESTASI TERHADAP
PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2017**

SKRIPSI

Oleh :

Bagus Andriyanto

NIM 140810101009

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM REGIONAL, INVESTASI TERHADAP
PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2017**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Bagus Andriyanto

NIM. 140810101009

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Riyanto dan Ibunda Tutik Tri Rejeki, yang dengan tulus mendidik, mendoakan, memperjuangkan, serta mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada ananda sehingga ananda senantiasa bersemangat dalam mengejar cita-cita dan menatap masa depan dengan optimis.
2. Kakak saya Febry Pratama yang telah memberikan kasih dan sayang yang tulus kepada ananda untuk terus semangat meraih keberhasilan dan kesuksesan.
3. Para pendidik dan pengajar ananda di bangku SD hingga perguruan tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan mendidik ananda dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

(Evelyn Underhill)

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”

(Kahlil Gibran)

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.”

(Schopenhauer)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagus Andriyanto

Nim : 140810101009

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika ada pengutipan dan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pada kemudian hari ini tidak benar.

Jember, 02 Agustus 2019

Yang menyatakan

Bagus Andriyanto

NIM. 140810101213

SKRIPSI

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM REGIONAL, INVESTASI TERHADAP
PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2017**

Oleh :

Bagus Andriyanto

NIM. 140810101009

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum
Regional, Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2008-2017

Nama Mahasiswa : Bagus Andriyanto

NIM : 140810101009

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 25 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E.,

M.P.

NIP. 196306141990021001

NIP. 197207131999031001

Mengetahui
Ketua Program Studi IESP,

Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P.

NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM REGIONAL,
INVESTASI TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008-2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bagus Andriyanto

NIM : 140810101009

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal

(.....)

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua :
NIP.
2. Sekretaris :
NIP.
3. Anggota :
NIP.

Foto 4 x 6

Warna

Mengatahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA
NIP. 19710727 199512 1 001

*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Investasi Terhadap
Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017*

Bagus Andriyanto

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum regional, dan investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Data yang dipakai menggunakan data sekunder, dan data panel sehingga menghasilkan 152 observasi dari data yang mewakili 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis regresi linier berganda menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel dan menghasilkan uji hipotesis secara simultan (uji F), parsial (uji t), koefisien determinan (uji R^2) pada *level significance* 5%. Hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran, dengan nilai signifikansi sebesar 0,0015. Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran dengan nilai signifikansi sebesar 0,0024. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran dengan nilai signifikansi sebesar 0,0721. Hasil perhitungan nilai statistik dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi dalam menjelaskan pengangguran di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 91,90 % sedangkan sisanya 8,10 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Investasi, dan Pengangguran

Effects of Economic Growth, Regional Minimum Wages, Investment on Unemployment in East Java Province 2008-2017

Bagus Andriyanto

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence economic growth, regional minimum wage levels, and investment have on Unemployment in East Java Province. The data used used secondary data and panel data to produce 152 observations from data representing 38 districts / cities in East Java Province. The method of multiple linear regression analysis uses the OLS (Ordinary Least Square) method using panel data and produces simultaneous hypothesis testing (F test), partial (t test), determinant coefficient (R² test) at the level of significance of 5%. Simultaneous hypothesis test results (F test) can be seen that Economic Growth, Minimum Wages, and Investment have a significant effect on Unemployment with a significance value of 0.0000. The partial hypothesis test results (t test) showed that Economic Growth has a significant effect on Unemployment, with a significance value of 0.0015. The Minimum Wage has a significant effect on unemployment with a significance value of 0.0024. Investment has no significant effect on unemployment with a significance value of 0.0721. The results of the calculation of statistical values can be seen that Economic Growth, Minimum Wages, and Investment in explaining unemployment in East Java Province is 91.90% while the remaining 8.10% is explained by other variables outside the model.

Keywords : Economic Growth, Minimum Wages, Investment, and Unemployment

RINGKASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017 ;
Bagus Andriyanto, 140810101009; 2019; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Menurut BPS Jawa Timur pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang cukup stabil, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,55% jumlah lebih besar dari Pertumbuhan Ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,02% (BPS, 2016). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan turunnya tingkat pengangguran yang ada di Jawa Timur. Dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi seringkali menggunakan Produk Domestik Regional Bruto, karena menjelaskan pendapatan total masyarakat di suatu wilayah atau daerah (Andrei, 2011). Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan dan mengembangkan juga sektor sektor yang ada dalam perekonomian. Dengan berkembangnya sektor tersebut, maka secara tidak langsung akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah/wilayah yang meningkat tersebut. Hal ini terjadi karena dengan meningkatnya sektor perekonomian dibutuhkan modal guna mencukupi lonjakan perekonomian tersebut. Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap pengangguran yaitu upah. Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Penelitian yang dilakukan Fields (2006) yang

berjudul *The Unemployment Effects of Minimum Wages* menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minum maka tingkat pengangguran juga akan semakin tinggi. Menurut Harrod-Domar (Subri,2003) dalam teorinya menyatakan bahwa investasi mampu menciptakan permintaan, sekaligus juga memperbesar kapasitas produksi, kapasitas produksi yang membesar tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar pula, dimana dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan investasi akan meningkatkan perbelanjaan agregat dan pendapatan nasional serta akan diikuti oleh penambahan kesempatan kerja. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mahmood, *et al.* (2014).*Determinants of Unemployment in Pakistan : A Statistical Study* menunjukkan bahwa investasi langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum regional, dan investasi. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum regional, dan investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum regional, dan investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan DPJKP Kementerian Keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1.) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2017. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan

pengangguran dapat dijelaskan dalam teori hukum okun yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara pengangguran dan output dalam siklus bisnis (demburg, 1985). Hukum okun menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) point pengangguran akan mengurangi GDP (Gross Domestik Product) sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebaliknya pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. 2.) Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2017. Hubungan antara upah minimum dengan pengangguran dapat dijelaskan melalui teori kekakuan upah, dimana Upah tidak selalu bisa fleksibel atau tidak bisa melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Hal ini berarti nilai dari upah minimum ini selalu berada diatas keseimbangan pasar tenaga kerja. Pada dasarnya tuntutan kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya yang dilihat dari PDRB nya yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, tetapi hal itu berdampak pada berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Itu disebabkan karena apabila upah minimum meningkat, maka biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin meningkat, sehingga perusahaan merespon hal tersebut dengan melakukan inefisiensi pada perusahaan. Kebijakan yang diambil adalah pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya biaya produksi, sehingga ini berarti terjadi PHK dan pengangguran menjadi bertambah 3.) Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2017. Hubungan antara Investasi dengan pengangguran dapat dilihat berdasarkan Teori Harrod Domar (Mulyadi, 2003), dalam teorinya berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Dengan asumsi full employment. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pekerja Bagian Percetakan Pada Industri Kecil Batu Bata di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi suatu persyaratan kelulusan atas tertempuhnya pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih dari hati yang terdalam kepada :

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar, ikhlas, dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sejak duduk di bangku kuliah.
4. Ibu Dr. Riniati, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. selaku Dosen penguji skripsi dan pendadaran.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
7. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Riyanto dan Ibunda Tutik Tri Rejeki. Terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi dan perhatian yang tak

terhingga serta pengorbanannya sehingga saya mampu menapakkan kaki pada bangku perkuliahan sampai detik ini dan menyelesaikan studi S1.

9. Kakak saya Febri Pratama, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tulus kepada adikmu sampai detik ini sehingga senantiasa termotivasi untuk menjadi contoh kepada adikku.
10. Guru-guru saya mulai dari SD hingga SMA yang selalu mendidik, menginspirasi, memberi dukungan, nasehat, kesabaran serta motivasi yang bermanfaat.
11. Penyemangatku Vivy Siska Ningrum yang selalu sabar dan tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat yang tiada habisnya serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman kontrakan yang selalu menemani dan mendukung untuk terus selalu berkarya selama menempuh pendidikan S1.
13. Zianur Rosi, Sugeng Riyanto, Arief Trio dan Moch. Iqbal terimakasih sudah sabar mengajarku dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2014 lainnya dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam menyusun skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 02 Agustus 2019

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
.....	xxii
 BAB 1. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11

2.1.1 Teori Malthus	11
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.3 Upah Minimum Regional.....	20
2.1.4 Investasi	23
2.1.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran.....	28
2.1.6 Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran.... ...	28
2.1.7 Pengaruh Investasi terhadap Pengangguran.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Konseptual	37
2.4 Hipotesis	39
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Unit Analisis	40
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	40

3.5 Metode Analisis Data	
.....	41
3.6 Uji Penentuan Model	
.....	44
3.6.1 Uji Chow (<i>Chow Test</i>)	
.....	44
3.6.2 Uji Hausman (<i>Hausman Test</i>)	
.....	44
3.7 Uji Statistik	
.....	45
3.7.1 Uji t	
.....	45
3.7.2 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)	
.....	46
3.7.3 Pengujian Menggunakan Koefisien Determinasi (Uji R^2) ...	
.....	46
3.8 Uji Asumsi Klasik	
.....	47
3.8.1 Uji Normalitas	
.....	47
3.8.2 Uji Multikolinearitas	
48	
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas	
48	
3.8.4 Uji Autokorelasi	
49	
3.9 Definisi Variabel Operasional	
49	
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
.....	51

4.1 Gambaran Umum	
.....	51
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur.....	51
.....	51
4.1.2 Gambaran Perkembangan Penduduk Jawa Timur	
.....	52
4.2 Hasil Analisis Data	
.....	54
4.2.1 Hasil Chow Test dan Hausman Test	
.....	54
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel	
.....	55
4.2.3 Uji Statistik	
.....	57
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	
.....	59
4.3 Pembahasan	
.....	63
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur	
.....	63
4.3.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur	
.....	65
4.3.3 Pengaruh Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur	
.....	66
BAB 5. Penutup	
.....	68
5.1 Kesimpulan	
.....	68
5.2 Saran	
.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
.....	69

LAMPIRAN
..... **71**

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 22008-2017	3
1.2 Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur Tahun 22008-2017	5
1.3 Investasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 22008-2017	7
1.4 Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 22008-2017	8
2.1 Penelitian Terdahulu	32
2.2 Hasil Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu	35
4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur	53
4.2 Hasil Uji Chow	54
4.3 Hasil Uji Hausman	55
4.4 Hasil Analisis Data Panel	55
4.5 Hasil Uji F	57
4.6 Hasil Uji t	58
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	61
4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas	62
4.10 Hasil Uji Autokorelasi	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kurva Upah Kaku	28
2.2 Kerangka Konseptual	38
4.1 Peta Wilayah Jawa Timur	52
4.2 Hasil Uji Normalitas	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Common Effect	71
2. Fixed Effect	72
3. Random Effect	73
4. Chow Test	74
5. Hausman Test	75
6. Uji Normalitas	76
7. Uji Multikolinieritas	76
8. Uji Heterokedastisitas	77
9. Lampiran Rekapitulasi Data	78

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam hal kesempatan kerja. Inti dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dipihak lain (Sukirno 2013:445).

Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara sama seperti dalam tujuan makro ekonomi yaitu untuk mencapai stabilitas perekonomian, kondisi kesempatan kerja penuh, mencapai inflasi yang rendah, tingkat pengangguran rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Masalah yang dihadapi negara sedang berkembang pada umumnya adalah kondisi yang unik dari kombinasi permasalahan pergerakan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar, stagnannya produktivitas pertanian dan meningkatnya pengangguran di daerah perkotaan dan pedesaan. (Todaro, 2000:132)

Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkat dari GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga Negara dan orang asing) dalam suatu Negara (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di Negara tersebut karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu Negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu Negara (Mankiw, 2000:67). Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persendikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Hal ini mengindikasikan

bahwa tinggi/rendahnya tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan pertumbuhan GDP dalam Negara tersebut. Sementara untuk suatu wilayah, GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Peningkatan output tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan Dharmayanti (2011) mengenai Analisis Pengaruh PDRB, Upah, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan serta memiliki pengaruh positif terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.

Menurut BPS Jawa Timur pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang cukup stabil, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,55% jumlah lebih besar dari Pertumbuhan Ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,02% (BPS, 2016). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan turunnya tingkat pengangguran yang ada di Jawa Timur. Hal ini dijelaskan dalam hukum Okun. Samuelson (2005) menyatakan dalam hukum Okun bahwa untuk setiap 2 persen kemerosotan GNP dari GNP potensialnya, tingkat pengangguran melonjak 1 persen. Kemudian Mankiw (2006:248) menyatakan perubahan persentase dalam GDP riil sama dengan 3 persen kurang dua kali perubahan dalam tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP riil tumbuh sampai kira-kira 3 persen, pertumbuhan normal ini mengacu ke pertumbuhan populasi, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Selain itu, untuk setiap persentase tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP riil turun sampai 2 persen. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 6 persen menjadi 8 persen maka GDP riil turun sebesar 1 persen.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2008	5,94
2.	2009	5,01
3.	2010	6,68
4.	2011	6,44
5.	2012	6,64
6.	2013	6,08
7.	2014	5,86
8.	2015	5,44
9.	2016	5,55
10.	2017	5,45

Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang dihitung dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Jawa Timur mengalami fluktuasi yang cukup stabil dimana pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sebesar 6,11% mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2009 yang mencapai 5,01%. Pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu menjadi 6,68% dan menurun hingga ditahun 2015 mencapai 5,44%. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,55%. Kenaikan jumlah pertumbuhan ekonomi ini menandakan adanya peningkatan output produksi barang dan jasa yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 5,45%.

Dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi seringkali menggunakan Produk Domestik Regional Bruto, karena menjelaskan pendapatan total masyarakat di suatu wilayah atau daerah (Andrei, 2011). Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan dan mengembangkan juga sektor sektor yang ada dalam perekonomian. Dengan berkembangnya sektor tersebut, maka secara tidak langsung akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah/wilayah yang meningkat tersebut. Hal ini terjadi karena dengan meningkatnya sektor perekonomian dibutuhkan modal guna mencukupi lonjakan perekonomian tersebut. Upah juga akan berdampak pada tingkat kesempatan kerja dan

pengangguran, adanya penerapan upah minimum di tiap Kabupaten/Kota justru akan mengurangi tingkat permintaan akan tenaga kerja yang justru pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Adanya penerapan upah minimum akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat sedangkan permintaan tenaga kerja itu sendiri akan berkurang yang pada akhirnya akan menyebabkan pengangguran.

Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap pengangguran yaitu upah. Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Penelitian yang dilakukan Fields (2006) yang berjudul *The Unemployment Effects of Minimum Wages* menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum maka tingkat pengangguran juga akan semakin tinggi.

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Menurut J.R. Hicks (dalam Kaufman dan Hotchkiss, 1999) Teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan kasus khusus dan teori nilai umum. Upah adalah harga tenaga kerja. Dalam perekonomian masalah pengangguran merupakan masalah ekonomi yang harus dihadapi dan diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan dimana dalam kebijakan upah minimum ini dapat menentukan jumlah pengangguran di setiap daerah. Interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja

akan menentukan tingkat upah keseimbangan dan sebaliknya peningkatan penawaran akan menurunkan tingkat upah

Penerapan upah minimum, terutama untuk negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak seperti Indonesia akan mengakibatkan penambahan pengangguran. Pengangguran terbuka terjadi pada generasi mudanya yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka adalah bekerja di sektor modern atau di kantor dan dengan upah yang cukup tinggi. Untuk mendapatkan kesempatan itu mereka bersedia menunggu dalam waktu yang lama. Hal ini lah yang menyebabkan kecenderungan tingginya angka pengangguran. (Siregar 2013: 25).

Tabel 1.2 Upah Minimum Provinsi di Jawa Timur Tahun 2008-2017

No.	Tahun	Upah Minimum Provinsi Jawa Timur (Rp)
1.	2008	500.000
2.	2009	570.000
3.	2010	630.000
4.	2011	705.000
5.	2012	745.000
6.	2013	866.250
7.	2014	1.000.000
8.	2015	1.150.000
9.	2016	1.283.000
10.	2017	1.388.000

Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di Jawa Timur dari tahun 2008 sampai tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun tingkat upah minimum yang ditetapkan pada Provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah di Indonesia. Upah yang ditetapkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 500.00 perbulan, sampai pada tahun 2017 upah minimum yang ditetapkan terus meningkat menjadi sebesar Rp. 1.388.000,00 perbulan. Peningkatan upah tersebut berdampak pada pengusaha karena akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan laba perusahaan, sehingga produsen akan dihadapkan dua pilihan yaitu berhenti memproduksi atau tetap memproduksi

dengan menaikkan harga barang atau dengan menekan biaya produksi salah satunya yaitu mengurangi tenaga kerja (Lestyasari, 2013).

Menurut Mankiw (2007), tingkat upah minimum merupakan tingkat upah bagi tenaga kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah kabupaten, yang setiap tahunnya mengalami perubahan sesuai kesepakatan. Penetapan tingkat upah pada suatu wilayah memberikan dampak terhadap pengangguran. Karena semakin tinggi upah minimum sebesar sepuluh persen akan mengurangi para pekerja usia muda satu sampai tiga persen, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tingkat pengangguran yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena semakin tingginya upah yang harus dikeluarkan maka berpengaruh terhadap peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya, suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja dan menyebabkan menambah tingkat pengangguran.

Harrod-Domar (Subri,2003) dalam teorinya menyatakan bahwa investasi mampu menciptakan permintaan, sekaligus juga memperbesar kapasitas produksi, kapasitas produksi yang membesar tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar pula, dimana dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan investasi akan meningkatkan perbelanjaan agregat dan pendapatan nasional serta akan diikuti oleh pertambahan kesempatan kerja. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mahmood, *et al.* (2014).*Determinants of Unemployment in Pakistan : A Statistical Study* menunjukkan bahwa investasi langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

Selain itu (Sukirno, 2012:368) penambahan barang modal dari investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa yang akan datang sehingga menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. Berikut data investasi di Jawa Timur yang disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.3 Investasi di Provinsi Jawa Timur (dalam Juta Rupiah)

No.	Tahun	Investasi (Rp)
1.	2008	2 778.3
2.	2009	4 290.7
3.	2010	8 084.1
4.	2011	9 687.5
5.	2012	21 520.3
6.	2013	34 848.9
7.	2014	38 132.0
8.	2015	35 489.8
9.	2016	46 331.6
10.	2017	45 044.5

Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa nilai investasi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2008-2017 selalu mengalami kenaikan. Meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 35,489,8 Juta Rupiah, namun dari tahun 2008-2017 secara umum mengalami peningkatan. Meningkatnya investasi di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa banyak modal yang masuk dan berkembang yang berdampak pada meningkatnya sektor-sektor dalam perkenomian provinsi Jawa Timur. Meningkatnya nilai investasi, maka akan berdampak pada jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah juga akan meningkat (RB dan Soekarnoto, 2014).

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu tetapi belum memperolehnya. Pengangguran merupakan istilah untuk seseorang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 2004).

Masalah pengangguran adalah salah satu permasalahan dalam tercapainya tujuan ekonomi makro dalam suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah akan menimbulkan dampak negative. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada individu, melainkan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat dan bahkan juga suatu perekonomian. Pengangguran dapat menyebabkan tidak stabilnya suatu perekonomian,

terhambatnya pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat dan bahkan meyebabkan permasalahan sosial ekonomi serta berujung kemiskinan (Zuliadi, 2016).Semakin rendah angka pengangguran maka semakinmakmur kehidupan masyarakat suatu negara, begitu pula sebaliknya semakin tinggi angka pengangguran maka semakin berkurang tingkat kemakmuran masyrakat suatu negara (Qomariyah, 2012).

Pengangguran dapat terjadi akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil prosentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan atas penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja, atau didalam pasar tenaga kerja jumlah penawaran akan tenaga kerja yang ada lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah permintaan tenaga kerja (Subandi, 2011).

Tabel 1.4Pengangguran Provinsi Jawa Timur Tahun 2008–2017

No.	Tahun	Pengangguran (%)
1.	2008	6,42
2.	2009	5,08
3.	2010	4,25
4.	2011	5,33
5.	2012	4,09
6.	2013	4,30
7.	2014	4,19
8.	2015	4,47
9.	2016	4,21
10.	2017	4,12

Sumber: BPS Jawa Timur (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4jumlah pengangguran terbuka ditahun 2017 sebesar 4,12%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur mencapaisebesar 4,30%. Pada tahun selanjutnya Penganggurandi Jawa Timur mengalami fluktuasi yang cenderung menurun namun jumlah tingkat pengangguran ini masih tergolong cukup besar.Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pengangguran ditahun 2017 sebanyak 838.283 jiwa.

Dilihat dari pentingnya uraian diatas, penelitian ini mencoba mengkaji dampak dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan investasi dalam mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat upah minimum regional terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat upah minimum regional terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh investasi swasta terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai:

1. Bagi akademisi, bisa menjadi tambahan wawasan, gagasan, ataupun pengetahuan tentang pengeluaran pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan investasi terhadap Pengangguran.
2. Selaku pemangku kebijakan, pemerintah bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait peningkatan ekonomi di suatu wilayah tersebut.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, apabila melakukan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sama sehingga dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, ataupun juga dijadikan pembanding dengan penelitian lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Malthus

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "*Essay on Population*", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan.

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun

hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

Menurut Sukirno, 1994 (dalam Qadrunnada, 2017) berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok:

- a. Pengangguran Friksional yaitu dimana pengangguran itu terjadi karena parapenganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, namun mereka menganggur karena ingin mendapatkan kerja yang lebih baik lagi.
- b. Pengangguran Siklikal yaitu dimana pengangguran tersebut terjadi karena adanya penurunan permintaan agregat atau kemerosotan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produksi sehingga mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja bahkan menutup perusahaannya sehingga para pekerja tersebut menjadi pengangguran.
- c. Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini juga dapat terjadi di dalam perusahaan seperti biaya pengeluaran terhadap bahan baku produksi sehingga perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerja sehingga menyebabkan terjadinya Pengangguran Struktural.
- d. Pengangguran Teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tugas pada tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin.

Menurut Nanga, 2001 (dalam Budiani, 2009) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu:

- a. Tingkat upah; dimana tingkat upah memegang peranan yang sangat besar dalam ketenagakerjaan. Tingkat upah yang berlaku akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja.
- b. Teknologi; penggunaan teknologi yang tepat guna akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran.

- c. Produktivitas; peningkatan produktivitas tenaga kerja akan mengurangi permintaan tenaga kerja dan hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran.
- d. Fasilitas modal; fasilitas modal mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui 2 sisi dimana sisi pengaruh substitusi bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenaga kerja, sedangkan sisi pengaruh komplementer bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk pengelolaan modal yang tersedia.
- e. Struktur perekonomian; perubahan struktur ekonomi menyebabkan penurunan tenaga kerja, terutama tenaga kerja anak dan tenaga kerja tidak terdidik.

Menurut Sukirno, 1994 (dalam Hartanto dan Masjkuri, 2017) berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi kedalam empat kelompok :

- a. Pengangguran Terbuka yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja.
- b. Pengangguran Tersembunyi yaitu pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian atau jasa. Pengangguran ini seringkali didapati karena banyaknya jumlah pekerja dalam suatu kegiatan lebih banyak dari yang diperlukan supaya dalam mengerjakan kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien.
- c. Pengangguran Musiman yaitu pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian, dimana pengangguran ini terjadi saat mereka tidak melakukan pekerjaan. Dalam arti disaat waktu kemarau maka para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya sehingga mereka terpaksa menganggur selanjutnya apabila waktu musim panen mereka akan kembali bekerja sampai waktu kembali menanam.
- d. Setengah Menganggur yaitu dimana pengangguran tersebut terjadi dikarenakan para pekerja itu mempunyai jam kerja yang sedikit. Biasanya antara 1 hingga 2 hari dalam satu minggu, 1 atau 4 jam dalam

sehari. Pekerja yang mempunyai masa kerja seperti itu disebut sebagai setengah menganggur (*underemployed*).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Menurut Arsyad (2010:60), Adam Smith adalah tokoh ekonom pertama yang memperhatikan lebih terhadap masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Salah satu proses pertumbuhan Adam Smith yaitu:

a. Pertumbuhan Output Total

Unsur – unsur pokok dalam sistem produksi suatu Negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu:

- 1) Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi) yaitu sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling utama dari kegiatan produksi suatu masyarakat dan merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Pertumbuhan output tersebut dapat berhenti jika sumber daya alam tersebut sudah habis atau digunakan secara penuh.
- 2) Sumber daya manusia (jumlah penduduk) mempunyai peranan pasif dalam proses pertumbuhan output maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
- 3) Stok barang dan modal yang ada semakin besar dapat melakukan spesialisasi dan pembagian kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Menurut Adam Smith, stok kapital mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat output total. Pengaruh langsung stok capital terhadap tingkat output total yaitu penambahan stok capital (yang diikuti penambahan tenaga kerja) akan meningkatkan tingkat output total, dengan begitu semakin banyak input maka semakin banyak output yang dihasilkan.

Pengaruh tidak langsung stok capital terhadap tingkat output total yaitu peningkatan produktivitas per kapita melalui dimungkinkannya tingkat spesialisasi dan pembagian kerja yang tinggi. Sehingga semakin besar stok capital, maka semakin besar kemungkinan spesialisasi dan pembagian kerja, dan diikuti semakin tingginya produktivitas per pekerja. Selain itu, ada dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal dalam terciptanya pertumbuhan output, yaitu: (1) Makin meluasnya pasar, (2) Adanya tingkat keuntungan diatas keuntungan maksimal. (Sukirno, 2000:167).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Menurut Arsyad (1997:125-126), teori Harrod-Domar ini merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Aliran Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, dalam teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Teori ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

- a. Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan nasional dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output *Capital Output Ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio = ICOR*)

Dalam teori Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari proporsi tertentu lain dari pendapatan nasionalnya jika untuk menggantikan barang-barang modal. Namun, untuk menumbuhkan

perekonomian, diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika diasumsikan bahwa ada hubungan ekonomi secara langsung antara besarnya stok modal diperlukan untuk menghasilkan tambahan output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modul-output tersebut.

Hal tersebut bisa dianalogikan, apabila ditetapkan bahwa $COR = k$, rasio kecenderungan menabung (MPS) = s yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi diproksikan oleh tingkat tabungan, akhirnya dapat diperoleh model ekonomi yang sederhana sebagai berikut:

- a. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu dari s , dari pendapatan nasional (Y). sehingga hubungan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut apabila ditulis dalam bentuk persamaan:

$$S = S_y \quad (2.1)$$

- b. Investasi neto (I) ditetapkan menjadi perubahan stok modal (K) yang dapat mewakili oleh ΔK , sehingga diperoleh:

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Namun, dikarenakan jumlah stok modal K berhubungan langsung dengan total pendapatan nasional atau output nasional Y , maka:

$$\frac{k}{y} = y$$

atau

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} = k$$

atau, akhirnya

$$\Delta k = k\Delta y \quad (2.3)$$

- c. Dikarenakan tabungan nasional netto (S) harus sama dengan investasi netto (I) maka dapat ditulis menjadi persamaan berikut ini:

$$S = I \quad (2.4)$$

Dari persamaan (2.1) diketahui bahwa $S = sY$, kemudia dari persamaan (2.2) dan (2.3) diketahui bahwa:

$$I = \Delta k = k\Delta y$$

Sehingga dapat ditulis dengan identitas tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \quad (2.5)$$

dapat disederhanakan menjadi:

$$sY = c\Delta Y \quad (2.6)$$

Dengan membagi kedua sisi persamaan (2.6) pertama dengan Y dan kemudian dengan K , sehingga diperoleh:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \quad (2.7)$$

Sisi kiri persamaan (2.7), atau $\frac{\Delta Y}{Y}$, sebenarnya merupakan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP (angka presentase perubahan GDP). Persamaan (2.7) adalah model sederhana dari persamaan dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\frac{\Delta Y}{Y}$) ditentukan secara bersama – sama oleh rasio tabungan nasional, s , serta rasio modal-output nasional, k . Secara rinci, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin banyak bagian GDP yang dihasilkan) dan secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio terhadap rasio modal-output pada suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output atau k , maka semakin rendah pula tingkat pertumbuhan GDP).

Secara sederhana dalam logika ekonomi yang digunakan dalam persamaan (2.7) adalah suatu perekonomian dapat tumbuh dengan pesat apabila suatu pemerintahan atau perekonomian tersebut menabung dan atau menginvestasikan sebagian dari GDP-nya. Laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat apabila semakin banyak bagian dari GDP yang ditabung atau diinvestasikan. Akan tetapi tingkat pertumbuhan secara aktual yang dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi, banyaknya tambahan output yang didapat dari satu tambahan unit investasi dapat diukur dengan kebalikan rasio modal-ouput k . Karena kebalikannya, $1/k$ adalah rasio modal-output

ataurasio output investasi. Kemudian, dengan mengalikan tingkat investasi baru $s = I/Y$, dengan tingkat produktivitasnya $1/k$, akan didapat tingkat pertumbuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan nasional atau GDP (Todaro, 2006).

3. Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Dalam Todaro (2000:110) Teori pertumbuhan Sollow - Swan, menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah adanya unsure kemajuan teknologi dalam model tersebut. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L), tapi syarat adanya pertumbuhan ekonomi dalam model Solow-Swan kurang restriktif, ini dikarenakan adanya kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini dapat dikatakan ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga tidak banyak diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiscal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi dapat dilihat dari kemampuan meningkatkan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital dapat meningkat.

Teori Neo-Klasik menganjurkan agar perekonomian diarahkan menuju pasar sempurna. Karena dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian dapat tumbuh maksimal. Paham neo-klasik juga beranggapan bahwa untuk dapat mencapai suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), perlu adanya tingkat saving yang tinggi dan semua keuntungan pengusaha harus diinvestasikan kembali.

4. Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Menurut Rostow dalam Arsyad (1997), menjelaskan bahwa sebuah Negara dapat bergerak melalui tahapan berurutan dalam upaya untuk mencapai kemajuan. Seperti yang dikemukakan Rostow dalam bukunya *The Stages of Economic Growth*. Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi terjadi dalam 5 tahap yaitu, masyarakat tradisional (*traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the pracondtions of take off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturirty*), dan masyarakat konsumsi tingkat tinggi (*high mass consumption*). Kelima tahapan tersebut didasarkan pada karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social, politik yang terjadi. Rostow beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang multidimensional dimana pembangunan bukan hanya pada perubahan struktur yang terjadi pada sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri saja, akan tetapi pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan:

- a. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik dan social yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar
- b. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi sebuah keluarga kecil.
- c. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif
- d. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi.

Rostow dalam Todaro (2000), mengemukakan bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan akan adanya mobilisasi dana tabungan dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sehingga kesempatan kerja meningkat, dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi atas meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

2.1.3 Upah Minimum regional

Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalah pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Upah merupakan sesuatu yang diperoleh tenaga kerja sebagai bentuk pertukaran jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8 / 1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral maupun subsektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah Upah pokok dan tunjangan. Upah pokok minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun subsektoral. Sedangkan dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk dengan tunjangan (Saimul, 2013).

Menurut Alghofari (2010) balas karya untuk hasil produksi tenaga kerja manusia disebut upah yang dalam arti luas termasuk gaji, honor, uang lembur, tunjangan dan sebagainya. Upah biasanya dibedakan menjadi dua yaitu upah nominal dan upah riil. Upah nominal yaitu upah sejumlah uang yang telah diterima, sedangkan upah riil merupakan sejumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu. Kebijakan dalam pemberlakuan upah riil dapat berpengaruh negatif, karena dapat menyebabkan terjadinya pengangguran.

Adanya tuntutan kenaikan upah minimum setiap kabupaten setiap tahunnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup kaum buruh. Namun bagi perusahaan malah sebaliknya dikarenakan jika upah minimum semakin meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga dapat terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan jumlah pengangguran (Kurniawan, 2013).

Menurut Gilarso (2003) tingkat upah disebut juga taraf bala karya rata – rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah dapat diperhitungkan perjam, hari, minggu, bulan, atau tahun. Menurut Gilarso sistem upah dibagi menjadi beberapa, yaitu :

1. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi yaitu besarnya balas karya yang langsung dikaitkan dengan prestasi kerjanya karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan jika hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif.

2. Upah waktu

Upah waktu merupakan besarnya upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Upah waktu dapat dihitung perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Sistem ini terutama digunakan dalam jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung perpotong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa – gesa, administrasinya juga dapat dengan sederhana. Disamping itu diperlukan adanya pengawasan apakah si pekerja sungguh – sungguh bekerja dalam bekerja selama jam kerja.

3. Upah borongan

Upah borongan yaitu balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan diborongkan. Cara menghitung upah ini kerap digunakan pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu upah yang kemudian dibagi – bagi antara para pelaksana.

4. Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut akan diberi premi. Premi dapat diberikan pada penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya.

5. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa dilakukan dibidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal diluar kalangan itu. Misal, pekerja atau pelaksana diberi bagian keuntungan bersih.

6. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarakan dua prinsip yaitu pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

Menurut Alghofari (2010), tenaga kerja menetapkan tingkat upah minimum pada tingkat upah tertentu. Jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut, sehingga menyebabkan seorang tersebut menganggur. Apabila upah yang ditetapkan suatu daerah terlalu rendah, maka dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, apabila upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini berakibat terjadinya peningkatan jumlah pengangguran (Mankiw, 2007).

Menurut Kaufman dan Hotchkiss dalam Alghofari (2011) penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan usulan atau masukan dari kondisi tingkat pengangguran karena semakin tinggi besaran tingkat upah yang ditetapkan akan semakin menurun jumlah orang yang bekerja pada suatu negara tersebut. Hubungan upah dengan pengangguran juga dijelaskan dalam teori A.W. Phillips, dimana tingkat upah atau inflasi memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat pengangguran sangat rendah, upah semakin tinggi dan jika tingkat pengangguran tinggi maka upah akan relatif lambat berlakunya.

Case and Fair (dalam Fajar 2013) naiknya *output* agregat (jumlah pemasukan) akan menurunkan pengangguran dan demikian sebaliknya. Keterkaitan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat harga

adalah turunnya pengangguran seiring pencapaian output kapasitas yang menaikkan tingkat harga menyeluruh.

2.1.4 Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf masyarakat. Peran ini bersumber tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu konsumen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi.
3. Investasi akan selalu di ikuti perkembangan teknologi

Menurut Sukirno (2000), investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran : 1) merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanam modal (investor) yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi, dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang

diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi (Samuelson dan Nordhaus, 1993).

Dalam ekonomi makro, investasi diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh alat-alat kapital baru. Dengan demikian, investasi total yang terjadi di suatu perekonomian sebagian berupa pembelian alat kapital baru untuk menggantikan alat kapital yang tidak ekonomis untuk dipakai lagi dan sebagian lain berupa pembelian alat-alat kapital yang baru untuk memperbesar stok kapital. Di sisi lain investasi diartikan sebagai pengeluaran dari sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang atau jasa untuk menambah stok barang dan perluasan perusahaan.

Menurut Sukirno (2000), ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu investasi, beberapa faktor tersebut, yaitu:

a. Suku Bunga

Suku bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Suatu rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabung akan diperoleh. Pada suku bunga rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi atau berinvestasi daripada menabung. Dengan demikian apabila suku bunga rendah masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya atau pengeluaran untuk berinvestasi.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari barang-barang lainnya. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu

ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

c. Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) memiliki dua pengertian yang berbeda, pertama, sumber daya manusia berarti usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja. Secara sederhana tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang termasuk dalam usia kerja.

d. Nilai Tukar (*Kurs*)

Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang satu negara terhadap harga mata uang negara lain. Nilai tukar mata uang dapat didefinisikan sebagai harga relatif dari mata uang terhadap mata uang Negara lainnya. Pergerakan nilai tukar di pasar dapat dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non fundamental. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Selain itu, Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (*traded goods*) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (*non traded goods*), sehingga

didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

Harrod-Domar (Subri,2003) dalam teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi, kapasitas produksi yang membesar tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar pula, dimana dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*.

Investasi berbeda dengan tabungan, tabungan biasanya dilakukan oleh perorangan dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai tujuan penabung, sedangkan investasi dilakukan oleh suatu bisnis atau perusahaan dengan tujuan yang ditentukan oleh bisnis itu sendiri (Rosyidi, 1998:167). Investasi merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal, sedangkan tabungan adalah bagian dari penyerapan yang tidak terpakai dalam pemenuhan barang dan jasa. Investasi mempunyai peranan yang nyata dalam perekonomian melalui dua cara, yaitu melalui *agregate demand* dan *agregate supply*. Investasi mempengaruhi *agregat demand* melalui peningkatan penyerapan nasional dan tingkat kesempatan kerja, peningkatan penyerapan nasional ini akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang kemudian akan menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas produksi sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan *agregate supply*.

Investasi adalah pengeluaran sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan untuk perluasan pabrik (usaha).Investasi adalah bentuk dari pengerahan sumber daya yang bertujuan untuk menciptakan ataupun menambah kapasitas suatu produksi atau pendapatan dimasa mendatang.Ada dua tujuan utama dari investasi, yaitu mengganti bagian persediaan yang rusak atau juga sebagai tambahan modal yang sudah tersedia. Investasi secara umum dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Investasi yang terdorong (*Included Investment*) dan Investasi Otonom (*Autonomous Investment*)

Investasi yang terdorong adalah investasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan baik daerah maupun pusat.Investasi ini diakibatkan adanya

pertambahan permintaan yang disebabkan oleh bertambahnya pendapatan. Sedangkan investasi otonom adalah investasi yang dilakukan pemerintah yang biayanya sangat besar dan tidak memberikan keuntungan, dimana besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan baik itu daerah atau pusat, tetapi dapat berubah karena adanya faktor diluar pendapatan seperti teknologi, kebijakan pemerintah, harapan masyarakat dan lain sebagainya.

b. Investasi Publik (*Public Investment*) dan Investasi Swasta (*Private Investment*)

Investasi Publik adalah bentuk investasi yang dilakukan pemerintah baik oleh pusat ataupun daerah yang bertujuan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama.

c. Investasi Domestik (*Domestic Investment*) dan Investasi Asing (*Foreign Investment*)

Investasi domestik adalah penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri, sedangkan investasi asing adalah penanaman modal yang sumber pendanaannya berasal dari asing atau luar negeri.

d. Investasi Bruto (*Gross Investment*) dan Investasi Netto (*Netto Investment*)

Investasi bruto adalah total keseluruhan investasi yang dilakukan atau diselenggarakan dalam suatu periode waktu. Sedangkan investasi netto adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

Menurut Sukirno (2000), investasi swasta merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang bersifat kurang stabil, dan menjadi sumber penting dalam perekonomian. Besarnya investai perusahaan dapat dilihat dalam analisis hubungan dengan tingkat bunga. Apabila suku bunga rendah, permintaan akan investasi akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila suku bunga naik akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi. Selain itu, dikatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta kemakmuran masyarakat.

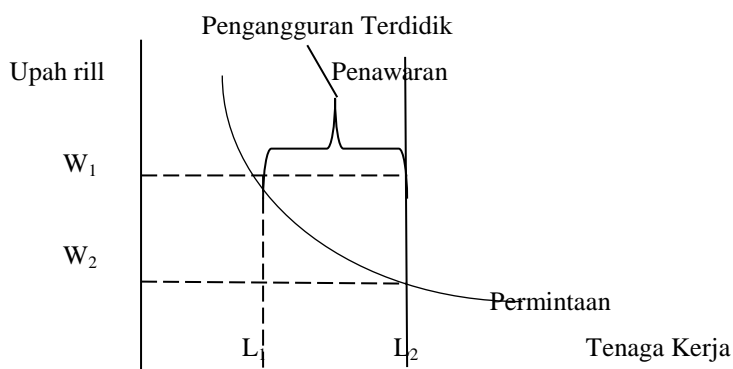
2.1.5 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan dalam teori hukum Okun yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara pengangguran dan output dalam siklus bisnis (demburg, 1985). Hukum Okun menunjukkan bahwa penambahan 2 (dua) point pengangguran akan mengurangi GDP (Gross Domestic Product) sebesar 1 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebaliknya pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hukum Okun berpendapat bahwa apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya, yang telah dicapai pada tahun tertentu, tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%” yang artinya semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah pengangguran. Karena pertumbuhan ekonomi tersebut lebih berorientasi pada padat karya, yang berarti proses produksi lebih menggunakan tenaga manusia daripada tenaga mesin.

2.1.6 Pengaruh Upah minimum terhadap pengangguran.

Teori yang signifikan untuk menjelaskan keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah mengenai teori kekakuan upah. Kekakuan upah (*Wage rigidity*) adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.



Gambar 2.1 Kurva upah kaku (Mankiw, 2007)

Berdasarkan gambar 2.2 asumsi bahwa penerapan kebijakan mengenai upah minimum (sebesar W_1) di atas tingkat keseimbangan yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Upah tidak akan turun ke W_2 akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W_1 . Karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi L_1 sehingga timbul pengangguran sebesar L_2 dikurangi L_1 (Mankiw, 2007).

2.1.7 Pengaruh Investasi terhadap pengangguran.

Hubungan antara Investasi dengan pengangguran dapat dilihat berdasarkan Teori Harrod-Domar (Mulyadi, 2003), dalam teorinya berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Dengan asumsi *full employment*. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Dharmayanti. (2011) yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB, Upah, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, Upah dan Inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis regresi menggunakan metode OLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, Upah dan Inflasi berpengaruh secara signifikan serta memiliki pengaruh positif terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrei *et al* (2009) yang berjudul *The Correlation Between Unemployment and Real GDP Growth. A Study Case in Romania*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korelasi antara pengangguran dan Pertumbuhan PDB di Romania. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan metode OLS. Hasil ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara pengangguran dan PDB di Rumania.

Penelitian yang dilakukan oleh Darman (2013) dengan judul jurnal “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran : Analisis Hukum Okun”. Hasil analisis menunjukkan di Indonesia koefisien Okun berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Karena tingkat pengangguran cenderung meningkat dengan dicapainya pertumbuhan GDP.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilegbinosa *et al* (2014) yang berjudul *Population and its Impact on Level of Unemployment in Least Developed Countries: An Appraisal of the Nigerian Economy*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di negara berkembang khususnya di Nigeria. Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di beberapa negara berkembang khususnya Nigeria.

Penelitian yang dilakukan oleh Seputiene (2011) dengan judul “*The Estimation of The Relationship Between Wages*” menganalisis kekuatan hubungan antara tingkat upah dengan pengangguran di negara – negara Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara upah dan tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Alghofari (2010) dengan judul “Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980 - 2007”. Dari hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel populasi penduduk, tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury (2014) dengan judul “*Determinants of Unemployment in Bangladesh : A Case Study*”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Sedangkan pertumbuhan PDB dan nilai tukar memiliki dampak yang negatif pada tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan Pitartono dan Banatul (2012) dengan judul “Analisis Tingkat pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2010”. menjelaskan bahwa jumlah penduduk dan upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmood *et al.* (2014) dengan judul “*Determinants of Unemployment in Pakistan : A Statistical Study*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran. Sedangkan investasi langsung dan inflasi berpengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan Budi dan Siti (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014” menunjukkan variabel jumlah penduduk, pendidikan, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Sedangkan upah minimum dan berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh R.B dan Soekarnoto (2014) yang berjudul Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Pengangguran di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Penelitian terdahulu disajikan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil
1	Dharmayanti (2011). Analisis Pengaruh PDRB, Upah, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009	(OLS) <i>Ordinary Least Square</i>	PDRB, Upah dan Inflasi berpengaruh secara signifikan serta memiliki pengaruh positif terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2	Andrei <i>et al</i> (2009). <i>The Correlation Between Unemployment and Real GDP Growth. A Study Case in Romania.</i>	Regresi Linier Sederhana	ada korelasi antara pengangguran dan PDB di Rumania.
3	Ilegbinosa <i>et al</i> (2014). <i>Population and its Impact on Level of Unemployment in Least Developed Countries: An Appraisal of the Nigerian Economy</i>	OLS (<i>ordinary least square</i>)	Bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di beberapa negara berkembang khususnya Nigeria.
4	R.B dan Soekarnoto (2014). Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011	OLS (<i>ordinary least square</i>)	PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Pengangguran di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
5	Darman (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran : Analisis Hukum Okun	OLS (<i>ordinary least square</i>)	Di Indonesia koefisien Okun berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. karena tingkat pengangguran cenderung meningkat dengan dicapainya pertumbuhan GDP.

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil
6	Fields (2006). <i>The Unemployment Effects of Minimum Wages</i>	Model <i>two sector</i> dengan analisis deskriptif	Semakin tinggi upah minum maka tingkat pengangguran juga akan semakin tinggi.
7	Alghofari (2010). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980 – 2007	Regresi linier berganda	Populasi penduduk, tingkat upah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.
8	Pitartono dan Banatul (2012). Analisis Tingkat pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2010	Analisi korelasi dan analisis deskriptif	Jumlah penduduk dan upah minimum berpengaruh positif, sedangkan pertumbuhan PDRB dan inflasi berpengaruh negatif.
9	Chowdhury (2014) <i>Determinants of Unemployment in Bangladesh : A Case Study</i>	Regresi Linier Sederhana	Terdapat hubungan positif antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Sedangkan pertumbuhan PDRB dan nilai tukar memiliki dampak yang negatif pada tingkat pengangguran.
10	Mahmood, <i>et al.</i> (2014). <i>Determinants of Unemployment in Pakistan : A Statistical Study</i>	Regresi linier berganda dan uji asumsi klasik	Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran, investasi langsung dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil
11	Kaliq, <i>et al.</i> (2014) <i>The Relationship between Unemployment and Economic Growth in Arab Country</i>	EGLS Pooled (<i>cross section</i> SUR)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.
12	Budi dan Siti (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014	(OLS) <i>Ordinary Least Square</i>	Jumlah penduduk, pendidikan, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Sedangkan upah minimum dan berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di Jawa Timur.
13	Rosoiu dan Andreea (2014). <i>The Relation Between Unemployment Rate and Economic Growth in USA</i>	Uji ADF dan KPSS (<i>Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin</i>)	Hasil yang diperoleh antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa variabel ini berhubungan dengan hukum Okun.
14	Utomo (2013). Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran di Indonesia	Regresi linier sederhana	Variabel upah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
15	Subramaniam dan Ahmad (2011). <i>Determinants of Unemployment in The Philippines</i>	Uji ADF, <i>Autoregressive DistributedLag Model (ARDL)</i>	Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di Filipina, variabel FDI dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

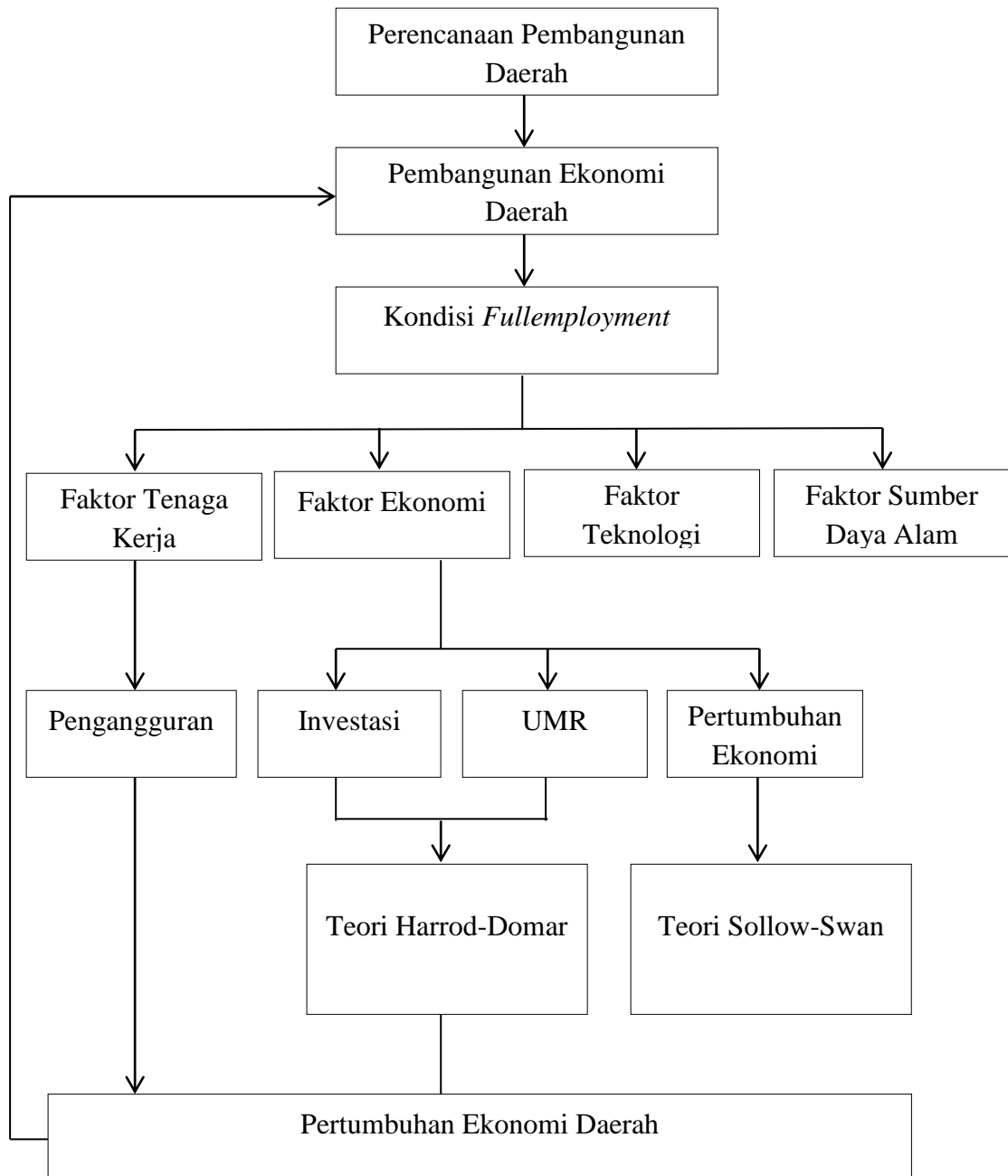
Tabel 2.2 Hasil Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
- (OLS) <i>Ordinary Least Square</i> -Variabel PDRB, Upah dan Pengangguran	-Variabel Inflasi -Tahun pengamatan
-Variabel PDRB dan Pengangguran	- Regresi Linier Sederhana -Variabel Inflasi -Tahun pengamatan
- (OLS) <i>Ordinary Least Square</i> -Variabel Pengangguran	-Variabel Jumlah Penduduk -Tahun pengamatan
- (OLS) <i>Ordinary Least Square</i> -Variabel PDRB, Upah, Investasi dan Pengangguran	-Variabel Inflasi -Tahun pengamatan
- (OLS) <i>Ordinary Least Square</i> -Variabel Pengangguran	-Tahun pengamatan
-Variabel Upah dan Pengangguran	-Tahun pengamatan - Model <i>two sector</i> dengan analisis deskriptif
-Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah dan Pengangguran	-Variabel Inflasi dan Populasi penduduk -Tahun pengamatan - Regresi linier berganda
- (OLS) <i>Ordinary Least Square</i> -Variabel PDRB, Upah dan Pengangguran	-Variabel Inflasi dan Jumlah penduduk -Tahun pengamatan

Persamaan	Perbedaan
-Variabel PDRB dan Pengangguran	-Variabel Inflasi dan nilai tukar -Tahun pengamatan - Regresi Linier Sederhana
-Variabel PDRB, Investasi dan Pengangguran	-Variabel pertumbuhan penduduk, Inflasi dan Laju pertumbuhan penduduk -Tahun pengamatan - Regresi linier berganda
-Variabel Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran	-Tahun pengamatan - EGLS Pooled (<i>cross section</i> SUR)
- (OLS) <i>Ordinary Least Square</i> -Variabel PDRB, Upah dan Pengangguran	-Variabel Jumlah penduduk dan pendidikan -Tahun pengamatan
-Variabel PDRB dan Pengangguran	-Tahun pengamatan - Uji ADF dan KPSS (<i>Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin</i>)
-Variabel PDRB, Upah dan Pengangguran	-Variabel Inflasi -Tahun pengamatan - Regresi linier sederhana
-Variabel PDRB dan Pengangguran	-Variabel Inflasi -Tahun pengamatan - Uji ADF, <i>Autoregressive DistributedLag</i> Model (ARDL)

2.3 Kerangka Konseptual

Perencanaan Pembangunan Daerah menjadikan suatu acuan yang digunakan pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi yang dimana pembangunan ekonomi tersebut disertai dengan memperhatikan kondisi tenaga kerja. Kondisi tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh empat faktor yakni faktor Tenaga Kerja, Faktor Ekonomi, Faktor Teknologi, dan Faktor Sumber Daya Alam. Faktor ekonomi dapat memunculkan variabel Investasi, UMR, dan Pertumbuhan Ekonomi. Teori Harrod-domar menerangkan mengenai kegiatan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produksi. Kemudian terdapat teori Harrod Domar yang membahas tentang keterkaitan antara UMR dengan pengangguran. Tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, angkatan kerja dibagi menjadi dua yaitu bekerja dan mencari kerja. Seseorang yang bekerja atau yang mencari kerja secara tidak langsung berkaitan dengan upah. Hal tersebut didukung adanya kurva pasar tenaga kerja yang menunjukkan hubungan antara penawaran ataupun permintaan tenaga kerja dengan upah. Kemudian terdapat teori Sollow-Swan yang membahas tentang keterkaitan antara PDRB dengan pengangguran. Kegiatan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan upah kepada pekerjanya, lalu dapat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Ketiga variabel investasi, upah, dan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi daerah. Kemudian variabel tersebut dibedakan menjadi dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Investasi sedangkan untuk variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka. Variabel- variabel tersebut akan diukur dengan alat regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 2.1 Kerangka Konspetual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau simpulan yang diambil berdasarkan teori dalam kajian pustaka. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pengangguran.
2. Diduga Upah Minimum Regional berpengaruh positif terhadap Pengangguran.
3. Diduga Investasi Regional berpengaruh negatif terhadap Pengangguran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *eksplanatory*, merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel peneliti dengan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1995).

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan investasi sebagai variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen Pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan mengambil data tahun 2008-2017. Jawa Timur dipilih sebagai provinsi yang diteliti, karena termasuk Provinsi yang termasuk memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua di Indonesia dan memiliki nilai tingkat pengangguran terendah di seluruh provinsi di pulau Jawa

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara tanpa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip yang dipublikasikan. Data dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri atas penggabungan dari data deret berkala (*time series*) dari tahun 2008 – 2017 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 38 data yang mewakili 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga menghasilkan 152 observasi. Menurut Widarjono (2005), data panel adalah gabungan data *time series* dan data *cross section*.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan DPJKP Kementerian Keuangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Data pertumbuhan ekonomi yang diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari tahun 2008 – 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- b. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda, maka disebut upah minimum provinsi. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dengan rentang waktu 2008 – 2017 dalam rupiah (Rp).
- c. Data investasi yang terdiri atas:
 - 1) Investasi Masyarakat yang diproyeksikan dari Dana Pihak Ketiga yang ada di Bank Komersial di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2017 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Investasi Industrial yang diproyeksikan dari data Penanaman Modal Dalam Negeri yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur.

3.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel. Menurut Nachrowi & Usman (2006), metode OLS ini akan memberikan hasil regresi yang baik tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode regresi linier data panel ini digunakan untuk meregresi pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta, terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebagai alat pengolahan data digunakan Eviews 9 dalam penelitian ini.. Data panel dalam

penelitian ini adalah kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Ada beberapa kelebihan apabila menggunakan data panel. Menurut Baltagi dalam Gujarati (2012) menjelaskan beberapa kelebihan data panel diantaranya:

- a. Data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara dan lain-lain, dari waktu ke waktu terdapat batasan *heterogenitas* dalam unit-unit tersebut. Teknik estimasi data panel yang heterogen tersebut secara eksplisit dapat diperhitungkan.
- b. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, data panel dapat memberikan lebih banyak informasi, variasi, dan sedikit kolinearitas antar variabel, serta derajat bebas lebih besar dan lebih efisien.
- c. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, daripada studi berulang-ulang (*cross section*).
- d. Data panel lebih baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak sederhana yang tidak dapat dilihat pada data *time series* murni atau *cross section* murni.
- e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. Semisal fenomena keekonomian berskala dan perubahan teknologi yang lebih tepat dipelajari dalam data panel.
- f. Data panel bisa meminimumkan bias yang terjadi apabila ingin mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar dengan membuat data menjadi beberapa ribu unit.

Adapun model ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Penyerapan} = f(G, ump, I)$$

Model ekonomi tersebut kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika, sehingga menjadi:

$$TP_{it} = \beta_0 + \beta_1 G_{it} + \beta_2 I_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

TP : Pengangguran

G : Pertumbuhan Ekonomi

UMP : Upah minimum

I : Investasi

i : *Cross Section*

t : *Time Series*

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien Regresi (variabel yang diestimasi)

ε : *Error term* (variabel gangguan)

Penggunaan data panel dalam analisis dapat menggunakan dua metode yaitu *Fixed Effect Method* (FEM) dan *Random Effect Method* (REM). Sehingga sebelum melakukan pengestimasi model penelitian, dilakukan terlebih dahulu uji spesifikasi guna menganalisis model FEM atau REM yang akan digunakan. Cara menentukan uji spesifikasi adalah dengan melakukan Uji Chow (*Chow Test*) dan Uji Hausman (*Hausman Test*). Berikut adalah 2 model yang akan diujikan dalam penelitian ini:

a. *Fixed Effect Method* (FEM)

Metode yang digunakan dalam mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perubahan dalam intersep. Dalam metode ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Intersep dan koefisien slope adalah tetap antar waktu dan ruang dan *error term* mencakup perbedaan waktu dan individu
- 2) *Slope* adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu
- 3) *Slope* tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu
- 4) *Intersep* dan *Slope* berbeda antar individu, dan
- 5) *Intersep* dan *Slope* berbeda antar waktu dan antar individu

b. *Random Effect Method* (REM)

Metode ini merupakan metode yang akan mengestimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Teknik

yang digunakan dalam metode ini adalah dengan menambah variabel *error* yang mungkin akan muncul dalam hubungan antar waktu dan antar individu. Dalam metode ini lebih dianjurkan menggunakan metode *GLS (Generalized Least Square)* guna mendapatkan estimator yang efisien daripada menggunakan *OLS*.

3.6 Uji Penentuan Model

3.6.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect* digunakan signifikansi Chow. Uji Chow memberikan penilaian dengan menggunakan *chi-square statistic* sehingga keputusan penggunaan model dapat ditentukan dengan benar.

- a. Buat hipotesis Uji Chow: H_0 : *Common Effect* dan H_1 : *Fixed Effect*
- b. Tentukan kriteria pengujian: apabila *Chi-Square* hitung $<$ *Chi-Square* tabel dan probabilitas hitung $>$ $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima, sehingga metode *random effect* lebih tepat digunakan.

Hipotesa dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*

3.6.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji ini digunakan untuk menentukan model apakah yang akan digunakan *fixed effect method* atau *random effect method* yang paling efektif. Uji Hausman memberikan penilaian dengan menggunakan *chi-square statistic* sehingga keputusan penggunaan model dapat ditentukan dengan benar.

Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. Buat hipotesis Uji Hausman: H_0 : *Random Effect* dan H_1 : *Fixed Effect*
- b. Tentukan kriteria pengujian: apabila *Chi-Square* hitung $<$ *Chi-Square* tabel dan probabilitas hitung $>$ $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima, sehingga metode *random effect* lebih tepat digunakan.

Hipotesa dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*

3.7 Uji Statistik

Pengujian statistic terdiri atas: a. Uji $F_{statistik}$ (uji pengaruh secara simultan), b. Uji $t_{statistik}$ (uji pengaruh secara parsial) dan c. uji R^2 (koefisien determinasi)

3.7.1 Uji t

Uji signifikansi secara simultan merupakan uji hipotesa secara gabungan atau serentak untuk mengetahui hubungan antara X_1, X_2, X_3 terhadap variable Y . Dengan kriteria apabila probabilitas hitung lebih besar dari ($\alpha = 0,05$). Keterangan : ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel – variabel bebas yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum, dan Investasi (X_1, X_2, X_3) berpengaruh secara bersama (serentak) terhadap variabel terikat yaitu tingkat Pengangguran (Y). (Supranto, 1995:268).

$$F = \frac{R^2/k-1}{1-R^2(n-k)}$$

Keterangan:

F = Pengujian secara simultan

k = Jumlah variabel

n = Banyaknya sampel R^2

k-1 = derajat bebas pembilang

n-k = derajat bebas penyebut

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas. Secara bersama – sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara bersama – sama mempengaruhi variabel dijelaskan secara signifikan.

3.7.2 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Mulyono (1991: 224) Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sesuatu variabel independent (individu) secara parsial mempengaruhi variabel dependent. Dengan kriteria jika nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel berdasarkan nilai *level of significance* (0,05) maka hipotesis nol (H_0) diterima dan H_a ditolak. Dan jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel berdasarkan nilai *level of significance* (0,05) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_a diterima. Dalam penelitian ini menggunakan uji one tailed, yakni pengujian hipotesis yang sudah diketahui arah positif maupun negatifnya.

Hipotesis pengujian uji t adalah :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_0 : \beta_1 \neq 0$$

Artinya apabila β_1 sama dengan nol, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila β_1 tidak sama dengan nol, maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3 Pengujian Menggunakan Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independent dapat menjelaskan variabel dependennya. Konsep *Ordinary Least Square* (OLS) adalah meminimumkan residual, sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antar variabel *dependent* dan variabel *independent*. Nilai R^2 yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel *independent* yang dimasukkan dalam model dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent sangat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati satu, berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependent

3.8 Uji Asumsi Klasik

Hasil analisis regresi dengan metode Ordinary Least Square yang signifikan sudah dapat menentukan bahwa model regresi yang diperoleh telah dapat menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Untuk memperjelas dan memperkuat hasil analisis, maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik perlu dilakukan, hal ini dikarenakan dalam model regresi yang dilakukan harus memperhatikan penyimpangan atas asumsi klasik, karena apabila asumsi klasik tidak terpenuhi maka variabel-variabel penjelas akan menjadi tidak efisien.

Uji asumsi klasik terdiri atas berbagai uji – uji lainnya, yaitu:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal atau mendekati normal adalah model regresi yang baik (Ghozali, 2014). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang akan dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis. Model untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

$$J-B \text{ hitung} = [S^2/6 + (\frac{k-3}{24})]$$

dimana:

S = *Skewness Statistic*

K = Kurtosis

Dalam uji normalitas ada beberapa kriteria pengujian, yakni sebagai berikut:

- a. Nilai $JB_{hitung} >$ nilai X^2_{tabel} atau nilai $JB_{hitung} <$ nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* terdistribusi normal ditolak;
- b. Nilai $JB_{hitung} <$ nilai X^2_{tabel} atau nilai $JB_{hitung} >$ nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* terdistribusi normal diterima.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel bebas. Dalam hal ini, variabel bebas tidak bersifat ortogonal. Variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat R^2 dari *auxiliary regression* yaitu dengan nilai R^2 model utama dengan regresi dari masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai R^2 parsial dari tiap variabel bebas $>$ dari R^2 model utama, maka terjadi multikolinearitas dalam regresi tersebut. Selain itu bisa juga dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF $>$ dari 10 maka data yang diteliti memiliki multikolinearitas, apabila nilai VIF $<$ dari 10 maka data yang diteliti tidak memiliki multikolinearitas.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variansi* dalam semua pengamatan. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah apabila terdapat kesamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (*homoskedastisitas*). Untuk mendeteksinya bisa digunakan Uji White dengan membandingkan nilai probabilitas dan tingkat *alpha*. Dalam uji ini, apabila nilai probabilitas observasi $R^2 >$ dari nilai $\alpha = 5\%$ maka tidak ada heteroskedastisitas. Namun, sebaliknya bila nilai probabilitas observasi $R^2 <$ $\alpha = 5\%$ maka ada heteroskedastisitas.

3.8.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gangguan pada suatu fungsi regresi yang erat muncul diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam model. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu (*time series*).

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey (BG Test)*. Penguraian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu e , dengan menggunakan model *autoregressive* dengan e sebagai berikut :

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dengan H_0 adalah $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi.

3.9 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar terhindar dari terjadinya pemahaman yang kurang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka berikut adalah definisi dan pengukuran dari variabel operasional tersebut:

1. Pengangguran yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran yang diteliti yaitu Pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2017 dalam satuan persen (%).
2. Pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang diprosikan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan pada data BPS Jawa Timur dengan rentang waktu 2008 – 2017 dalam satuan persen (%).
3. Upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha kerjanya. Karena pemenuhan

kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda, maka disebut upah minimum provinsi. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dengan rentang waktu 2008 – 2017 dalam rupiah(Rp)

4. Investasi adalah keseluruhan nilai investasi dengan menggunakan data investasi keseluruhan di provinsi jawa timur pada tahun 2008-2017 yang diukur dalam satuan rupiah.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di 38 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2008 – 2017 berfokus pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi terhadap tingkat Pengangguran. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Artinya semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka akan menurunkan Pengangguran di Jawa Timur.
2. Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Artinya semakin tinggi Upah Minimum maka akan menaikkan Pengangguran di Jawa Timur.
3. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Kabupaten/ Kota provinsi Jawa Timur. Artinya investasi dapat menurunkan Pengangguran di Jawa Timur.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi masalah Pengangguran merupakan hal yang perlu dilakukan. Perlunya kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan di setiap daerahnya.
2. Lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar semua variabel bebas bias meningkat pula, yang nantinya akan mengurangi tingkat Pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 2005. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga
- Andrei, D.B., Vasile, D., dan Adrian E. 2009. *The Correlation Between Unemployment and Real GDP Growth. A Study Case in Romania*. *Journal of Economics Literature*. 2(1): 317-322
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Tahun 2013*. Jawa Timur: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Tahun 2014*. Jawa Timur: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Tahun 2015*. Jawa Timur: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Tahun 2016*. Jawa Timur: BPS.
- Damodar N., Gujarati dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2. Edisi 5*. Raden Carlos Mangunsong (penj.). Jakarta: Salemba Empat.
- Dharmayanti, Yeny. 2011. *Analisis Pengaruh PDRB, Upah, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009*. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ilegbinosa, I.A., Moses, O.L., dan Praise, U.I. 2014. *Population and its Impact on Level of Unemployment in Least Developed Countries: An Appraisal of the Nigerian Economy*. *Arts and Social Sciences Journal*. 5(2): 1-7.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Mankiw N, Gregory, dkk. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Qomariyah, Isti. 2012. *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

- RB, Tengko Sarimuda dan Soekarnoto. 2014. *Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2: 106-119.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Dirjen PUOD, Jakarta.
- Said, R. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 1993. *Pengantar Ekonomi Edisi Ke Empat Belas*. Jakarta: Erlangga.
- Simanjuntak, P. J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Tambunan, Tulus H. 2001. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. S. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zuliadi, Ari. 2016. *Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat*. *Skripsi*. Meulaboh: Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Lampiran

Lampiran Hasil *E-Views*

1. COMMON EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/05/19 Time: 18:21
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 380

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.805841	0.238432	15.96197	0.0000
X1	1.30E-05	2.14E-06	6.082087	0.0000
X2	1.94E-07	2.39E-07	0.812279	0.4171
X3	7.49E-08	1.18E-07	0.636803	0.5246
R-squared	0.144119	Mean dependent var		4.492816
Adjusted R-squared	0.137290	S.D. dependent var		2.011817
S.E. of regression	1.868619	Akaike info criterion		4.098747
Sum squared resid	1312.893	Schwarz criterion		4.140222
Log likelihood	-774.7619	Hannan-Quinn criter.		4.115205
F-statistic	21.10450	Durbin-Watson stat		0.754098
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. FIXED EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/05/19 Time: 18:26
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 380

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.556317	0.167808	27.15195	0.0000
X1	-1.21E-06	2.41E-06	-2.502330	0.0158
X2	1.36E-08	1.60E-07	2.084788	0.0248
X3	-1.87E-07	1.06E-07	-1.773357	0.0721

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.919092	Mean dependent var	4.492816
Adjusted R-squared	0.885947	S.D. dependent var	2.011817
S.E. of regression	1.127431	Akaike info criterion	3.179379
Sum squared resid	430.9035	Schwarz criterion	3.604503
Log likelihood	-563.0821	Hannan-Quinn criter.	3.348070
F-statistic	21.69503	Durbin-Watson stat	2.251493
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. RANDOM EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/05/19 Time: 18:22
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 380
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.429794	0.289995	15.27541	0.0000
X1	4.16E-06	2.21E-06	1.878994	0.0610
X2	-5.52E-09	1.59E-07	-0.034732	0.9723
X3	-1.14E-07	1.01E-07	-1.130828	0.2588

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.474083	0.6309
Idiosyncratic random		1.127431	0.3691

Weighted Statistics			
R-squared	0.011512	Mean dependent var	1.056190
Adjusted R-squared	0.003625	S.D. dependent var	1.144680
S.E. of regression	1.142603	Sum squared resid	490.8836
F-statistic	1.459686	Durbin-Watson stat	1.974367
Prob(F-statistic)	0.225167		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.043072	Mean dependent var	4.492816
Sum squared resid	1467.896	Durbin-Watson stat	0.660254

4. CHOW TEST

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.753464	(37,339)	0.0000
Cross-section Chi-square	423.359674	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 05/05/19 Time: 18:22

Sample: 2008 2017

Periods included: 10

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 380

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.805841	0.238432	15.96197	0.0000
X1	1.30E-05	2.14E-06	6.082087	0.0000
X2	1.94E-07	2.39E-07	0.812279	0.4171
X3	7.49E-08	1.18E-07	0.636803	0.5246
R-squared	0.144119	Mean dependent var		4.492816
Adjusted R-squared	0.137290	S.D. dependent var		2.011817
S.E. of regression	1.868619	Akaike info criterion		4.098747
Sum squared resid	1312.893	Schwarz criterion		4.140222
Log likelihood	-774.7619	Hannan-Quinn criter.		4.115205
F-statistic	21.10450	Durbin-Watson stat		0.754098
Prob(F-statistic)	0.000000			

5. HAUSMAN TEST

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.187540	3	0.0042

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000001	0.000004	0.000000	0.0017
X2	0.000000	-0.000000	0.000000	0.3755
X3	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0165

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 05/05/19 Time: 18:23

Sample: 2008 2017

Periods included: 10

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 380

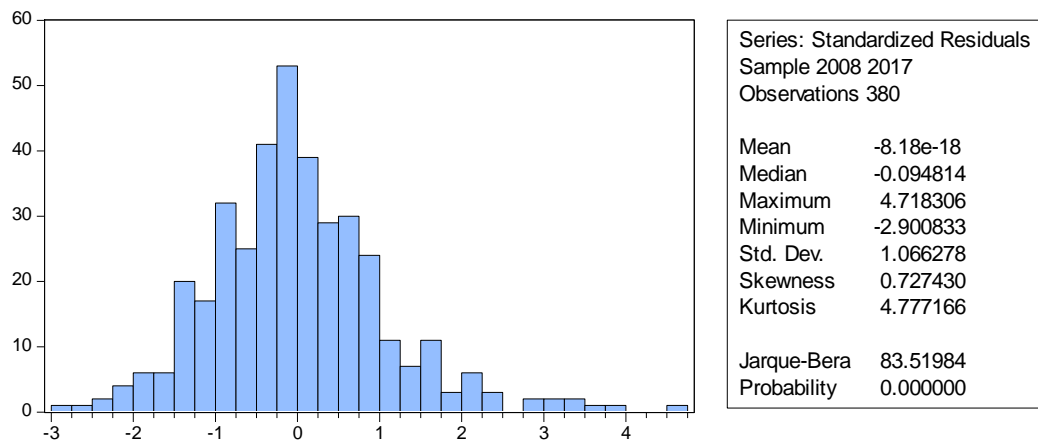
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.556317	0.167808	27.15195	0.0000
X1	1.21E-06	2.41E-06	0.502330	0.6158
X2	1.36E-08	1.60E-07	0.084788	0.9325
X3	-1.87E-07	1.06E-07	-1.773357	0.0771

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.719092	Mean dependent var	4.492816
Adjusted R-squared	0.685947	S.D. dependent var	2.011817
S.E. of regression	1.127431	Akaike info criterion	3.179379
Sum squared resid	430.9035	Schwarz criterion	3.604503
Log likelihood	-563.0821	Hannan-Quinn criter.	3.348070
F-statistic	21.69503	Durbin-Watson stat	2.251493
Prob(F-statistic)	0.000000		

6. UJI NORMALITAS



7. UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.779	1.283
	X2	.722	1.385
	X3	.597	1.674

a. Dependent Variable: Y

8. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/05/19 Time: 18:25
 Sample: 2008 2017
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 380

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.908921	0.097268	9.344531	0.0000
X1	-7.99E-07	1.39E-06	-0.572879	0.1171
X2	-5.60E-08	9.30E-08	-0.602275	0.1474
X3	-5.12E-08	6.12E-08	-0.835822	0.1138

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.247891	Mean dependent var	0.792086
Adjusted R-squared	0.159147	S.D. dependent var	0.712666
S.E. of regression	0.653501	Akaike info criterion	2.088672
Sum squared resid	144.7743	Schwarz criterion	2.513795
Log likelihood	-355.8476	Hannan-Quinn criter.	2.257362
F-statistic	2.793317	Durbin-Watson stat	2.132386
Prob(F-statistic)	0.000000		

9. Lampiran Rekapitulasi Data

No	Nama Kab/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Upah Minimum Rerional (X2)	Investasi (X3)	Pengangguran (Y)
1	Kabupaten Pacitan	2008	78231,2	450000	648273	1,02
2	Kabupaten Pacitan	2009	79341,8	500000	673283	0,99
3	Kabupaten Pacitan	2010	79621,1	550000	703173	1,31
4	Kabupaten Pacitan	2011	6817,4	630000	710117	1,1
5	Kabupaten Pacitan	2012	7246,2	705000	849358	1,54
6	Kabupaten Pacitan	2013	7705	750000	994300	1,02
7	Kabupaten Pacitan	2014	8153,2	887200	1039251	0,99
8	Kabupaten Pacitan	2015	8582,2	1000000	1061181	1,08
9	Kabupaten Pacitan	2016	9019,5	1150000	933375	0,97
10	Kabupaten Pacitan	2017	9489,1	1283000	802360	1,1
11	Kabupaten Ponorogo	2008	7821,9	450000	4352435	3,14
12	Kabupaten Ponorogo	2009	8021,2	500000	324133	3,25
13	Kabupaten Ponorogo	2010	7921,1	575000	325163	3,45
14	Kabupaten Ponorogo	2011	8961,5	635000	448540	3,17
15	Kabupaten Ponorogo	2012	9472,2	705000	163664	6,79
16	Kabupaten Ponorogo	2013	10038,4	745000	222319	3,14
17	Kabupaten Ponorogo	2014	10557,3	924000	397422	3,25
18	Kabupaten Ponorogo	2015	11104,5	1000000	472395	3,66
19	Kabupaten Ponorogo	2016	11687,9	1150000	474466	3,68
20	Kabupaten Ponorogo	2017	12305,7	1283000	644965	3,66
21	Kabupaten Trenggalek	2008	75212,9	460000	103728	3,5
22	Kabupaten Trenggalek	2009	79231,6	510000	102878	3,27
23	Kabupaten Trenggalek	2010	75620,8	575000	116747	3,91
24	Kabupaten Trenggalek	2011	79621,1	635000	119119	3,5
25	Kabupaten Trenggalek	2012	8435,2	710000	110092	3,27
26	Kabupaten Trenggalek	2013	8959,5	760000	75219	2,98
27	Kabupaten Trenggalek	2014	9482,2	903900	104270	4,04
28	Kabupaten Trenggalek	2015	94166,2	1000000	117539	4,2
29	Kabupaten Trenggalek	2016	10501,6	1150000	138284	2,46
30	Kabupaten Trenggalek	2017	11026,5	1283000	106388	2,98
31	Kabupaten Tulungagung	2008	16821,2	490000	531448	3,56
32	Kabupaten Tulungagung	2009	17992,2	526000	132445	3,1
33	Kabupaten Tulungagung	2010	17620,8	600000	132544	4,54

34	Kabupaten Tulungagung	2011	16776,3	641000	195570	4
35	Kabupaten Tulungagung	2012	17845,2	720000	310436	3,56
36	Kabupaten Tulungagung	2013	189992	815000	353415	3,1
37	Kabupaten Tulungagung	2014	20144,4	1007900	539769	2,71
38	Kabupaten Tulungagung	2015	21265,2	1107000	492992	2,42
39	Kabupaten Tulungagung	2016	22326,6	1237000	529325	3,95
40	Kabupaten Tulungagung	2017	23446,4	1420000	629498	2,42
41	Kabupaten Blitar	2008	15723,2	450000	351635	3,91
42	Kabupaten Blitar	2009	15923,3	501750	351453	3
43	Kabupaten Blitar	2010	16213,9	600000	535146	1,74
44	Kabupaten Blitar	2011	16213,9	655000	629498	3,91
45	Kabupaten Blitar	2012	17093,9	750000	155670	2,79
46	Kabupaten Blitar	2013	18054,5	820000	205359	2,82
47	Kabupaten Blitar	2014	18965,2	946800	248741	3,64
48	Kabupaten Blitar	2015	19920,2	1000000	257977	3,08
49	Kabupaten Blitar	2016	20925,5	1260000	317964	2,79
50	Kabupaten Blitar	2017	21991,4	1405000	348752	3,91
51	Kabupaten Kediri	2008	16312,2	645000	435145	2,79
52	Kabupaten Kediri	2009	18212,9	717000	325145	2,41
53	Kabupaten Kediri	2010	17562,8	750000	321443	5,1
54	Kabupaten Kediri	2011	16213,9	837000	264749	2,41
55	Kabupaten Kediri	2012	19408,3	934500	299309	8,33
56	Kabupaten Kediri	2013	20644,1	999000	1834970	4,08
57	Kabupaten Kediri	2014	21824,1	1089500	415356	4,65
58	Kabupaten Kediri	2015	22893,2	1135000	394983	4,91
59	Kabupaten Kediri	2016	24007,7	1305200	417226	5,02
60	Kabupaten Kediri	2017	25211,9	1475000	528068	4,08
61	Kabupaten Malang	2008	44523,2	743250	425453	4,65
62	Kabupaten Malang	2009	46312,3	802000	425265	5,51
63	Kabupaten Malang	2010	45620,8	900000	535263	6,35
64	Kabupaten Malang	2011	41342,9	1000000	469550	6
65	Kabupaten Malang	2012	44091,3	1077600	594260	5,51
66	Kabupaten Malang	2013	47076,2	1130500	1003822	3,75
67	Kabupaten Malang	2014	49711,4	1343700	1409442	5,17
68	Kabupaten Malang	2015	52550,4	1635000	1484227	4,83
69	Kabupaten Malang	2016	55317,8	1882200	1552680	4,95
70	Kabupaten Malang	2017	58247,3	2188000	1639182	5,51
71	Kabupaten Lumajang	2008	14561,2	495000	142513	4,6
72	Kabupaten Lumajang	2009	14623,7	550000	254365	2,01
73	Kabupaten Lumajang	2010	14260,1	600000	226156	2,24
74	Kabupaten Lumajang	2011	14260,1	688000	214804	1,9

75	Kabupaten Lumajang	2012	15144,4	740700	167647	3,16
76	Kabupaten Lumajang	2013	16053,4	825400	156131	4,6
77	Kabupaten Lumajang	2014	19940,5	1011900	223813	2,01
78	Kabupaten Lumajang	2015	17851,9	1120000	353646	2,83
79	Kabupaten Lumajang	2016	18676,9	1288000	472239	2,6
80	Kabupaten Lumajang	2017	19555,2	1437000	642182	2,01
81	Kabupaten Jember	2008	35212,8	575000	193763	3,77
82	Kabupaten Jember	2009	34511,2	645000	256356	3,94
83	Kabupaten Jember	2010	33375,5	750000	253653	4,42
84	Kabupaten Jember	2011	33375,5	830000	235572	3,36
85	Kabupaten Jember	2012	35208,2	875000	520548	3,34
86	Kabupaten Jember	2013	37262,6	920000	619639	3,77
87	Kabupaten Jember	2014	39224,5	1091900	652370	3,94
88	Kabupaten Jember	2015	41971,7	1270000	638789	4,64
89	Kabupaten Jember	2016	44222,6	1460500	745221	4,77
90	Kabupaten Jember	2017	46526,6	1629000	896759	3,94
91	Kabupaten Banyuwangi	2008	33512,5	567500	253767	6,06
92	Kabupaten Banyuwangi	2009	33412,4	619000	356253	3,41
93	Kabupaten Banyuwangi	2010	32463,8	750000	343256	4,05
94	Kabupaten Banyuwangi	2011	32463,8	824000	370589	3,48
95	Kabupaten Banyuwangi	2012	34720,4	865000	325779	6,06
96	Kabupaten Banyuwangi	2013	37235,7	915000	321177	3,41
97	Kabupaten Banyuwangi	2014	39649,9	1086400	475709	4,65
98	Kabupaten Banyuwangi	2015	42005,7	1240000	717580	7,17
99	Kabupaten Banyuwangi	2016	44529,9	1426000	1184476	2,55
100	Kabupaten Banyuwangi	2017	46924,6	1599000	1712261	3,41
101	Kabupaten Bondowoso	2008	8452,2	495000	235345	3,01
102	Kabupaten Bondowoso	2009	8489,2	550000	342545	3,6
103	Kabupaten Bondowoso	2010	8515,9	600000	365464	2,88
104	Kabupaten Bondowoso	2011	8515,9	668000	113739	2,83
105	Kabupaten Bondowoso	2012	9033,4	735000	87177	3,01
106	Kabupaten Bondowoso	2013	9583,4	800000	60584	3,6
107	Kabupaten Bondowoso	2014	10140,1	946000	160792	2,04
108	Kabupaten Bondowoso	2015	10652,4	1105000	242065	3,72
109	Kabupaten Bondowoso	2016	11179,6	1270700	206576	1,75
110	Kabupaten Bondowoso	2017	11735,6	1417000	190475	2,04
111	Kabupaten Situbondo	2008	8321,1	492500	37325	2,28
112	Kabupaten Situbondo	2009	8451,7	530000	36253	1,75
113	Kabupaten Situbondo	2010	8471,4	600000	47662	2,28
114	Kabupaten Situbondo	2011	8471,4	660000	34586	1,75
115	Kabupaten Situbondo	2012	8927,1	737000	63259	4,77

116	Kabupaten Situbondo	2013	9411,6	802500	90446	3,33
117	Kabupaten Situbondo	2014	10005,3	1048000	104665	3,01
118	Kabupaten Situbondo	2015	10572,4	1071000	115339	4,15
119	Kabupaten Situbondo	2016	11086,5	1209900	105563	3,57
120	Kabupaten Situbondo	2017	11640,8	1374000	109447	4,15
121	Kabupaten Probolinggo	2008	14231,9	566500	257467	1,92
122	Kabupaten Probolinggo	2009	14631,3	604000	256547	3,3
123	Kabupaten Probolinggo	2010	15028,1	650000	264784	1,47
124	Kabupaten Probolinggo	2011	15028,1	744000	235738	2,51
125	Kabupaten Probolinggo	2012	15912,5	814000	386103	3,3
126	Kabupaten Probolinggo	2013	16936,8	888500	159101	1,92
127	Kabupaten Probolinggo	2014	17838,2	1198600	132942	3,3
128	Kabupaten Probolinggo	2015	18682,2	1353700	158797	1,47
129	Kabupaten Probolinggo	2016	19571,6	1556800	432743	2,51
130	Kabupaten Probolinggo	2017	20504,1	1736000	349987	3,3
131	Kabupaten Pasuruan	2008	57212,6	740000	267463	4,34
132	Kabupaten Pasuruan	2009	57896,5	802000	476764	4,43
133	Kabupaten Pasuruan	2010	57838,2	900000	583785	2,6
134	Kabupaten Pasuruan	2011	61178,3	1005000	292262	1,74
135	Kabupaten Pasuruan	2012	65271,6	1170000	423498	2,8
136	Kabupaten Pasuruan	2013	70167,1	1252000	790298	6,38
137	Kabupaten Pasuruan	2014	74928,8	1720000	1058652	4,34
138	Kabupaten Pasuruan	2015	80105,4	2190000	1340009	4,43
139	Kabupaten Pasuruan	2016	84415,7	2700000	384332	6,41
140	Kabupaten Pasuruan	2017	89011,2	2800000	534397	2,8
141	Kabupaten Sidoarjo	2008	74212,1	743500	1563258	3,34
142	Kabupaten Sidoarjo	2009	74787,3	802000	1648243	4,3
143	Kabupaten Sidoarjo	2010	74928,8	900000	1749884	5,03
144	Kabupaten Sidoarjo	2011	81472,7	1005000	1971209	3,34
145	Kabupaten Sidoarjo	2012	87212,4	1107000	2695914	4,3
146	Kabupaten Sidoarjo	2013	93543,9	1252000	3186341	5,37
147	Kabupaten Sidoarjo	2014	99975,7	1720000	3892343	4,12
148	Kabupaten Sidoarjo	2015	106434,3	2190000	4226924	3,88
149	Kabupaten Sidoarjo	2016	112012,9	2705000	4901677	6,3
150	Kabupaten Sidoarjo	2017	118179,2	3037500	5438501	5,37
151	Kabupaten Mojokerto	2008	33218,9	740000	462878	3,81
152	Kabupaten Mojokerto	2009	33562,1	803652	475798	4,05
153	Kabupaten Mojokerto	2010	34171,1	900000	516784	10,19
154	Kabupaten Mojokerto	2011	34171,1	1009100	563209	8,47
155	Kabupaten Mojokerto	2012	36405,8	1105000	762263	8,65
156	Kabupaten Mojokerto	2013	39047,1	1234000	1026828	3,35

157	Kabupaten Mojokerto	2014	41579,2	1700000	1380705	3,16
158	Kabupaten Mojokerto	2015	44292,6	2050000	1433913	3,81
159	Kabupaten Mojokerto	2016	46792,3	2695000	1248887	4,05
160	Kabupaten Mojokerto	2017	49321,9	3030000	1855998	4,47
161	Kabupaten Jombang	2008	17123,1	640000	76462	6,79
162	Kabupaten Jombang	2009	17241,8	690000	73544	6,72
163	Kabupaten Jombang	2010	17350,8	750000	75658	5,54
164	Kabupaten Jombang	2011	17350,8	790000	88375	4,04
165	Kabupaten Jombang	2012	18385	866500	167071	6,79
166	Kabupaten Jombang	2013	19514,8	978200	261734	6,72
167	Kabupaten Jombang	2014	20672,3	1200000	342393	5,59
168	Kabupaten Jombang	2015	21793,2	1500000	385773	4,39
169	Kabupaten Jombang	2016	22960,2	1725000	475147	6,11
170	Kabupaten Jombang	2017	24199,1	1924000	779883	5,59
171	Kabupaten Nganjuk	2008	10231,8	455000	74635	6,19
172	Kabupaten Nganjuk	2009	10231,4	510000	78583	5,75
173	Kabupaten Nganjuk	2010	11405,4	600000	82474	6,19
174	Kabupaten Nganjuk	2011	11405,4	650000	85299	5,75
175	Kabupaten Nganjuk	2012	12061,2	710000	130818	6,58
176	Kabupaten Nganjuk	2013	12767,2	785000	132173	4,09
177	Kabupaten Nganjuk	2014	13473,8	960200	167029	4,73
178	Kabupaten Nganjuk	2015	14142,9	1131000	176010	3,93
179	Kabupaten Nganjuk	2016	14875,4	1265000	198556	2,1
180	Kabupaten Nganjuk	2017	15661,8	1411000	242364	4,73
181	Kabupaten Madiun	2008	8031,2	464750	164827	3,99
182	Kabupaten Madiun	2009	8041,2	522750	173826	4,63
183	Kabupaten Madiun	2010	8119,7	575000	181527	6,04
184	Kabupaten Madiun	2011	8119,7	660000	184594	4,25
185	Kabupaten Madiun	2012	8608,7	720000	194047	4,96
186	Kabupaten Madiun	2013	9135,7	775000	172582	3,99
187	Kabupaten Madiun	2014	9654,1	960700	182447	4,63
188	Kabupaten Madiun	2015	10169,7	1045000	428401	3,38
189	Kabupaten Madiun	2016	10704,9	1196000	402285	6,99
190	Kabupaten Madiun	2017	11268,9	1394000	581905	4,63
191	Kabupaten Magetan	2008	8021,8	596000	143637	3,95
192	Kabupaten Magetan	2009	8099,9	596000	153728	3,64
193	Kabupaten Magetan	2010	8277,8	600000	163782	3,82
194	Kabupaten Magetan	2011	8277,8	650000	161741	3,27
195	Kabupaten Magetan	2012	8744,8	705000	117219	3,95
196	Kabupaten Magetan	2013	9251,2	750000	997079	3,64
197	Kabupaten Magetan	2014	9789,6	866200	1042458	2,96

198	Kabupaten Magetan	2015	10169,7	1000000	168716	4,28
199	Kabupaten Magetan	2016	10704,9	1150000	180938	6,05
200	Kabupaten Magetan	2017	11268,9	1283000	201751	4,28
201	Kabupaten Ngawi	2008	8211,1	460000	163738	2,25
202	Kabupaten Ngawi	2009	8212,8	510000	163383	5,1
203	Kabupaten Ngawi	2010	8456,7	575000	173738	4,49
204	Kabupaten Ngawi	2011	8456,7	650000	132241	2,25
205	Kabupaten Ngawi	2012	8973,9	710000	136639	5,1
206	Kabupaten Ngawi	2013	9568,2	785000	108718	2,94
207	Kabupaten Ngawi	2014	10203	960200	171303	4,97
208	Kabupaten Ngawi	2015	10681	1131000	220420	5,61
209	Kabupaten Ngawi	2016	11223,1	1265000	248449	3,99
210	Kabupaten Ngawi	2017	11223,1	1411000	92787	4,97
211	Kabupaten Bojonegoro	2008	303412,2	550000	536373	3,42
212	Kabupaten Bojonegoro	2009	309812,7	630000	523644	5,81
213	Kabupaten Bojonegoro	2010	310203	750000	464737	4,52
214	Kabupaten Bojonegoro	2011	33291,9	825000	448540	3,11
215	Kabupaten Bojonegoro	2012	36751	870000	265462	5,7
216	Kabupaten Bojonegoro	2013	38136,1	930000	221115	3,42
217	Kabupaten Bojonegoro	2014	38993,7	1023500	397652	5,81
218	Kabupaten Bojonegoro	2015	39934.80	1140000	400272	3,21
219	Kabupaten Bojonegoro	2016	46892.80	1311000	618990	5,01
220	Kabupaten Bojonegoro	2017	57187.40	1462000	686486	3,21
221	Kabupaten Tuban	2008	27121,8	606000	332844	3,69
222	Kabupaten Tuban	2009	27982,6	660000	472683	4,13
223	Kabupaten Tuban	2010	28017,9	725000	354828	4,22
224	Kabupaten Tuban	2011	28017,9	870000	319743	2,7
225	Kabupaten Tuban	2012	29934,3	935000	651914	3,69
226	Kabupaten Tuban	2013	31836,3	970000	835271	4,13
227	Kabupaten Tuban	2014	33836,7	1144400	940856	4,3
228	Kabupaten Tuban	2015	35519.90	1370000	1880309	3,63
229	Kabupaten Tuban	2016	37256	1575500	2030868	3,03
230	Kabupaten Tuban	2017	39081.80	1757000	1787503	4,3
231	Kabupaten Lamongan	2008	15726,8	600000	163828	4,92
232	Kabupaten Lamongan	2009	15971,9	650000	228294	3,54
233	Kabupaten Lamongan	2010	16275,2	750000	201737	4,92
234	Kabupaten Lamongan	2011	16275,2	875000	190921	3,54
235	Kabupaten Lamongan	2012	17360,5	900000	265676	6,14
236	Kabupaten Lamongan	2013	18562,7	950000	361450	4,75
237	Kabupaten Lamongan	2014	19836,1	1075700	483831	4,93
238	Kabupaten Lamongan	2015	21099,9	1220000	545329	4,3

239	Kabupaten Lamongan	2016	22316,9	1410000	595416	4,1
240	Kabupaten Lamongan	2017	23623,8	1573000	604423	4,75
241	Kabupaten Gresik	2008	58121,8	743500	1647282	5,93
242	Kabupaten Gresik	2009	58921,9	803652	1738939	6,78
243	Kabupaten Gresik	2010	59068,6	900000	1794648	7,01
244	Kabupaten Gresik	2011	59068,6	1010400	1815702	6,52
245	Kabupaten Gresik	2012	62898,7	1130000	2192036	5,93
246	Kabupaten Gresik	2013	67248,8	1257000	2682085	6,78
247	Kabupaten Gresik	2014	71304,5	1740000	3306614	4,55
248	Kabupaten Gresik	2015	76336	2195000	5155658	5,06
249	Kabupaten Gresik	2016	81360.40	2707500	7070763	5,67
250	Kabupaten Gresik	2017	85835.10	3042500	10029496	4,55
251	Kabupaten Bangkalan	2008	14232,2	586000	16483	6,37
252	Kabupaten Bangkalan	2009	14623,2	622000	17493	5,13
253	Kabupaten Bangkalan	2010	15881,4	700000	18499	5,01
254	Kabupaten Bangkalan	2011	15881,4	755000	19488	2,76
255	Kabupaten Bangkalan	2012	16406,5	850000	46965	6,37
256	Kabupaten Bangkalan	2013	16173,7	885000	59966	5,13
257	Kabupaten Bangkalan	2014	16204	983000	149453	6,78
258	Kabupaten Bangkalan	2015	16804	1102000	177323	5,68
259	Kabupaten Bangkalan	2016	16906.80	1267300	250420	5
260	Kabupaten Bangkalan	2017	17018.60	1414000	284421	5,13
261	Kabupaten Sampang	2008	10002	475000	64838	1,71
262	Kabupaten Sampang	2009	10002	610000	94738	4,68
263	Kabupaten Sampang	2010	10064	650000	103838	2,22
264	Kabupaten Sampang	2011	10064	690000	107633	2,51
265	Kabupaten Sampang	2012	10315,3	725000	81524	2,22
266	Kabupaten Sampang	2013	10910,9	800000	36290	1,71
267	Kabupaten Sampang	2014	11622	1104600	54557	4,68
268	Kabupaten Sampang	2015	11632.90	1120000	72565	2,22
269	Kabupaten Sampang	2016	11874.50	1231600	77887	2,51
270	Kabupaten Sampang	2017	12606.80	1387000	110874	2,22
271	Kabupaten Pamekasan	2008	6862,2	560000	94738	2,13
272	Kabupaten Pamekasan	2009	6982,8	625000	95838	2,29
273	Kabupaten Pamekasan	2010	6994,2	800000	99437	1,7
274	Kabupaten Pamekasan	2011	6994,2	900000	111605	1,5
275	Kabupaten Pamekasan	2012	7429,4	925000	96746	2,13
276	Kabupaten Pamekasan	2013	7894	975000	106451	2,29
277	Kabupaten Pamekasan	2014	8369,6	1059600	135806	2,17
278	Kabupaten Pamekasan	2015	8368,5	1090000	177487	2,14
279	Kabupaten Pamekasan	2016	9316.90	1201700	272949	4,26

280	Kabupaten Pamekasan	2017	9815,80	1350000	314271	2,17
281	Kabupaten Sumenep	2008	13341,9	545000	143763	1,14
282	Kabupaten Sumenep	2009	13892,6	590000	163728	2,56
283	Kabupaten Sumenep	2010	14369,6	650000	154373	2,18
284	Kabupaten Sumenep	2011	15136,5	730000	159383	1,6
285	Kabupaten Sumenep	2012	16064,8	785000	131261	2,61
286	Kabupaten Sumenep	2013	17665	825000	137569	1,14
287	Kabupaten Sumenep	2014	20162,8	965000	134794	2,56
288	Kabupaten Sumenep	2015	21476,90	1090000	146201	1,01
289	Kabupaten Sumenep	2016	21750,60	1253500	173040	2,07
290	Kabupaten Sumenep	2017	22311,70	1398000	234534	2,61
291	Kota Kediri	2008	55132,4	645000	33683	7,92
292	Kota Kediri	2009	55981,8	717000	34264	7,66
293	Kota Kediri	2010	56162,8	850000	31727	5,68
294	Kota Kediri	2011	57550,6	906000	32885	6,17
295	Kota Kediri	2012	60020,1	975000	58982	5,71
296	Kota Kediri	2013	63185,1	1037500	64445	8,12
297	Kota Kediri	2014	65407	1128400	64991	7,92
298	Kota Kediri	2015	69232,9	1165000	79293	7,66
299	Kota Kediri	2016	72945,5	1339700	110216	8,46
300	Kota Kediri	2017	76959,4	1494000	116617	7,92
301	Kota Blitar	2008	2621,2	448500	462728	6,17
302	Kota Blitar	2009	2689,9	506500	572738	5,71
303	Kota Blitar	2010	2654,7	600000	562189	8,32
304	Kota Blitar	2011	2885,4	663000	592363	5,37
305	Kota Blitar	2012	3038,4	737000	785552	9,69
306	Kota Blitar	2013	3236,6	815000	1004392	3,68
307	Kota Blitar	2014	3445,2	924800	1482429	6,17
308	Kota Blitar	2015	3649,6	1000000	1647076	5,71
309	Kota Blitar	2016	3856,9	1243200	1781167	3,8
310	Kota Blitar	2017	3969,9	1405000	1639182	6,17
311	Kota Malang	2008	33621,3	745109	513363	5,24
312	Kota Malang	2009	33461,9	802941	528484	7,96
313	Kota Malang	2010	34465,2	900000	548383	8,47
314	Kota Malang	2011	31377,3	1006200	560117	6,5
315	Kota Malang	2012	33273,7	1079800	642103	5,24
316	Kota Malang	2013	35355,7	1132200	674721	7,96
317	Kota Malang	2014	37541,7	1340300	612961	7,73
318	Kota Malang	2015	39724,7	1587000	545919	7,22
319	Kota Malang	2016	41952,1	1882200	432743	7,28
320	Kota Malang	2017	44303,9	2099000	349987	6,5

321	Kota Probolinggo	2008	4831,8	567000	582784	5,26
322	Kota Probolinggo	2009	4898,2	604000	74677	4,48
323	Kota Probolinggo	2010	4921,3	650000	83626	5,16
324	Kota Probolinggo	2011	4921,3	741000	117337	4,01
325	Kota Probolinggo	2012	5213,9	810500	71951	4,74
326	Kota Probolinggo	2013	5552,1	885000	110208	5,26
327	Kota Probolinggo	2014	5911,3	1103200	174300	4,48
328	Kota Probolinggo	2015	6261,9	1250000	222647	5,16
329	Kota Probolinggo	2016	6628,8	1437500	384332	4,01
330	Kota Probolinggo	2017	6292,4	1603000	534397	8,53
331	Kota Pasuruan	2008	3451,8	650000	274284	7,73
332	Kota Pasuruan	2009	3478,2	710000	279482	5,46
333	Kota Pasuruan	2010	3591,3	750000	264638	4,54
334	Kota Pasuruan	2011	3585,4	865000	193878	7,73
335	Kota Pasuruan	2012	3810,7	926000	194452	5,46
336	Kota Pasuruan	2013	4051,2	975000	1026828	4,54
337	Kota Pasuruan	2014	4314,1	1195800	210184	5,41
338	Kota Pasuruan	2015	4901,6	1360000	268973	6,09
339	Kota Pasuruan	2016	5202,5	1575000	467098	5,57
340	Kota Pasuruan	2017	5211,5	1757000	401140	7,57
341	Kota Mojokerto	2008	2812,9	656000	133627	4,42
342	Kota Mojokerto	2009	2898,1	687000	133637	6,22
343	Kota Mojokerto	2010	2987,2	750000	148239	7,52
344	Kota Mojokerto	2011	2987,2	805000	161749	4,42
345	Kota Mojokerto	2012	3165,6	835000	147285	6,22
346	Kota Mojokerto	2013	3358,4	875000	154881	7,52
347	Kota Mojokerto	2014	3566,4	1040000	168621	5,73
348	Kota Mojokerto	2015	3774,6	1250000	428401	4,42
349	Kota Mojokerto	2016	3663,1	1437500	402285	4,88
350	Kota Mojokerto	2017	3759,9	1603000	272598	6,89
351	Kota Madiun	2008	5921,2	450000	128923	6,57
352	Kota Madiun	2009	5912,8	500000	137487	6,93
353	Kota Madiun	2010	6081,2	575000	148942	8,3
354	Kota Madiun	2011	6081,2	685000	182803	6,48
355	Kota Madiun	2012	6494,4	745000	176163	10,59
356	Kota Madiun	2013	6937,7	812500	103450	6,89
357	Kota Madiun	2014	7470,7	953000	166234	6,57
358	Kota Madiun	2015	7331,8	1066000	186700	6,93
359	Kota Madiun	2016	7523,1	1250000	220343	7,1
360	Kota Madiun	2017	7954,7	1394000	207274	6,93
361	Kota Surabaya	2008	221312,5	746000	3464200	9,82

362	Kota Surabaya	2009	225612,9	805500	3029100	10,62
363	Kota Surabaya	2010	227470,7	900000	3182200	11,27
364	Kota Surabaya	2011	231204,7	1031500	3252100	9,82
365	Kota Surabaya	2012	247686,6	1115000	3386700	10,62
366	Kota Surabaya	2013	265892,1	1257000	3446400	9,27
367	Kota Surabaya	2014	286507,2	1740000	3125400	9,32
368	Kota Surabaya	2015	305947,6	2200000	4342900	8,82
369	Kota Surabaya	2016	324215,2	2710000	6451500	10,01
370	Kota Surabaya	2017	343652,6	3045000	236600	9,82
371	Kota Batu	2008	6453,4	704000	174873	3,25
372	Kota Batu	2009	6486,3	737000	183673	3,81
373	Kota Batu	2010	6491,5	825000	190373	5,63
374	Kota Batu	2011	6504,4	989000	197058	3,25
375	Kota Batu	2012	6504,4	1050000	211426	3,81
376	Kota Batu	2013	6968,2	1100200	244625	3,51
377	Kota Batu	2014	7473,6	1268000	263112	2,3
378	Kota Batu	2015	7357,1	1580000	242589	2,43
379	Kota Batu	2016	9145,9	1877000	336965	4,29
380	Kota Batu	2017	9750,9	2026000	338772	3,81